



JURNAL ANALISIS SOSIAL

*Buruh
dan
Krisis Hubungan Industrial*

Edisi 1, Oktober 1995



DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi i

Bahasan Utama

- ▲ Politik perburuhan : Mencari Format Baru 1
- ▲ Beberapa Catatan Soal Pemogokan 5
- ▲ Krisis Perburuhan dalam Hubungan Industrial di Indonesia 9
- ▲ Koalisi Buruh dengan Kelas Menengah : sebuah Catatan 19
- ▲ Gerak Modal dan Tenaga Kerja 24

Ruang Metodologi

- ▲ Pendekatan Konvensional dan Pendekatan Alternatif dalam Penelitian Sosial 29

Resensi Buku

- ▲ Women and The Labour Market 35

Seputar AKATIGA

- ▲ Selayang pandang Perpustakaan AKATIGA 37
- ▲ Menimba Pengetahuan 39

.....

Pemimpin Utama

Ketua Pengurus Harian

Tim Redaksi

Indrasari Tjandraningsih

Dedi Haryadi

Marzila

Alamat Redaksi

Jl. Raden Patah 28 Bandung 40132

Telp./Fax. (022) 2502622

Diterbitkan Oleh

Yayasan AKATIGA

Pusat Analisis Sosial Bandung.

Salam perkenalan

Dari Bandung, sebuah kelompok kecil orang muda yang bergabung dalam sebuah lembaga penelitian dan analisis social independen AKATIGA yang peduli terhadap dinamika perkembangan bangsa, ingin menyumbangkan ide dan pikiran progresif mengenai persoalan-persoalan yang muncul dalam masyarakat kita, masyarakat Indonesia. Melalui Jurnal Analisis Sosial, kami mewujudkan keinginan itu. Jurnal ini dimaksudkan pula sebagai media dialog untuk siapa saja yang mempunyai perhatian terhadap kondisi social di sekitar kita.

Untuk terbitan pengenalan ini, diangkat topik yang tidak akan pernah habis dibicarakan karena tidak akan pernah habis menghadapi persoalan – yakni buruh. Selama 50 tahun menikmati kemerdekaan Negara dari penjajahan bangsa asing dan 50 tahun hidup di bawah Negara pemerintahan bangsa sendiri. Masih berulang pertanyaan, sudah merdeka pulakah kaum buruh?

Mengapa muncul pertanyaan semacam itu? Kita semua paham, bagaimana situasi dan kondisi kelompok buruh di Indonesia yang akrab dengan pelanggaran hak, pengaturan dan pembatasan yang membuahkan protes, tetepi pada saat yang sama juga akrab dengan tindakan-tindakan represi yang membuahkan ketakutan, bahkan untuk mempertanyakan hak-haknya yang dijamin secara hokum. Kali ini kita bersama-sama membahas dan mencoba mengurai akar persoalan kondisi tersebut dengan memperhatikan anatomi politik perburuhan yang diterapkan oleh pemerintah dengan segala akibatnya terhadap kemerdekaan buruh. Akan dilihat juga bagaimana respon buruh terhadap politik perburuhan dan siapa saja yang menemani mereka mengkritisi kondisi itu. Untuk bahasan-bahasna itu kami mengundang tiga orang teman yang dangat memahami persoalan perburuhan yakni Fauzi Abdullah, Razif dan Suryadi A. Radjab serta dua orang peneliti AKATIGA yaitu Dedi Haryadi dan Juni Thamrin untuk menyampaikan pandangan-pandangannya.

Pada intinya dinamika dan gejolak perburuhan yang terjadi banyak disumbang kebijakan pembangunan yang berwajah industry untuk mengejar pertumbuhan dengan tekanan pada pengamana beroperasinya modal. Perwujudan kebijakan itu adalah praktek-praktek yang memihak pada pengusaha atau pemilik modal dalam berbagai bentuk, diantaranya melalui konsep hubungan industrial yang ditetapkan oleh pemerintah. Hubungan industrial yang secara eksplisit menyatakan harmoni hubungan antara buruh dan modal kemudian hanya menghasilkan gejolak aksi buruh karena harmoni tersebut dalam kenyataannya tampil justru dalam bermacam upaya untuk menundukkan dan memperlemah posisi buruh. Kondisi semacam itu merangsang lahirnya berbagai aksi pemogokan dan bentuk-bentuk perlawanan buruh lainnya. Selain buruh sendiri muncul pula kelompok-kelompok lain yang bersikap kritis terhadap kondisi tersebut.

Di dalam jurnal ini kami juga menyediakan ruang untuk memdiskusikan soal metodologi, sebuah instrument sangat penting dalam melakukan berbagai kegiatan penelitian,

pendampingan ,pelatihan maupun advokasi. Lembaran untuk diskusi metodologi kali ini ditulis oleh Hetifah Sjaifudian, peneliti AKATIGA.

Kami merencanakan menerbitkan jurnal ini setiap empat bulan sekali. Untuk terbitan kedua akan dibahas soal peran dan nasib usaha kecil di Indonesia dan terbitan ketiga akan mengangkat berbagai persoalan agraria, terutama terutama yang menyangkut problem-problem sekitar sengketa agrarian yang cenderung meningkat jumlah dan kualitasnya.

Semoga Jurnal Analisis Sosial dapat menjadi bagian dari gerakan pencerdasan dan pemerdekaan berpikir kaum muda melalui sumbang pendapat dan pikiran.

INDRASARI TJANDRANINGSIH



BAHASAN UTAMA

Politik Perburuhan : Mencari Format Baru

Oleh : **DEDI HARYADI**
Peneliti AKATIGA

Sejak pertengahan decade 80-an sampai sekarang ini, dunia ketenagakerjaan kita diwarnai berbagai peristiwa, terutama berkaitan dengan kegelisahan kaum buruh. Kegelisahan dan kemarahan dipicu oleh buruknya kondisi kerja; upah rendah, jam kerja panjang, rendahnya jaminan social, jaminan kesehatan dan peristiwa unjuk rasa dan pemogokan, terutama di berbagai kawasan industry; Jabotabek, Bandung Raya, Medan, Surabaya, Semarang dan lain-lain.

Buruknya kondisi kerja buruh sebenarnya bukan hal baru dalam sejarah perkembangan perburuhan. Persoalan ini muncul terutama setelah terjadinya transformasi mode produksi dari system feodal ke kapitalisme. Pada saat itulah di berbagai belahan bumi, dan di berbagai kebudayaan, dijumpai adanya persoalan buruknya kehidupan buruh. Kesan yang tampak adalah, hamper selalu ditakdirkan buruh itu ditindas dan kalah. Sejarah kemudian mencatat bahwa ada beberapa kasus dimana buruh kemudian berhasil memperjuangkan suatu tingkat kehidupan yang lebih baik. Di sini kita bias menunjuk buruh di Negara-negara industry maju. Dan juga buruh-buruh di Negara-negara industry baru. Dengan demikian, melihat contoh ini, sebenarnya buruh tidak selalu ditakdirkan sebagai orang yang kalah. Dengan perjuangan keras, sabar dan tanpa henti, mereka berhasil membuat sejarah, buruh bias menang.

Di tanah air, apa yang kita dapati adalah suatu potret kelam perburuhan. Buruknya kehidupan buruh sepertinya permanen; apa yang terjadi sekarang ini, sebenarnya juga terjadi pada zaman revolusi kemerdekaan dan zaman colonial. Entah kapan kondisi buruh seperti itu akan berakhir. Sepanjang tidak ada upaya-upaya yang jelas untuk memperbaiki nasib mereka, tampaknya potret compang-campingnya perburuhan kita akan tetap menjadi bagian dari spektrum persoalan ketenagakerjaan nasional.

Perlu dipahami mengapa kondisi buruh seperti itu. Ada beberapa sebab yang bias kita duga sebagai factor yang mempengaruhi terciptanya kondisi seperti itu.

Pertama, struktur pasar tenaga kerja kita memang diwarnai adanya ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran. Kini semakin banyak penawaran tenaga kerja, sementara kemampuan kita meningkatkan sisi

permintaan sangat terbatas. Akibatnya muncullah berbagai jenis pengangguran. Saat ini diperkirakan orang yang bekerja dibawah 35 jam perminggu mencapai 40 persen. Dalam kondisi seperti itu bias dipastikan akan terjadi persaingan sengit untuk mendapatkan satu jenis pekerjaan. Dalam bobot tertentu, mereka bias memasuki jenis-jenis pekerjaan yang bias mencampakkan bobot kemanusiaan. Jadi dari sisi ini kondisi perburuhan kita dihadapkan kepada tekanan demografis yang sangat kuat. Menurut Manning, situasi ini tidak akan berakhir dalam jangka pendek, setidaknya 3-5 dekade mendatang kita akan masih menghadapi persoalan ini.

Meskipun kondisi buruh pada jaman colonial juga buruk, namun tekanan demografis pada saat itu belum begitu kuat. Kondisi kerja yang buruk pada saat itu lebih disebabkan oleh buruknya perlakuan pengusaha dan kebijakan pemerintah kolonial. Faktor tersebut juga ikut memperburuk kondisi kerja buruh sekarang ini.

Kedua, strategi industrialisasi dan kebijakan perburuhan. Awal decade 80-an terjadi perubahan strategi industrialisasi dari substitusi impor ke orientasi ekspor. Ini memang harus dilakukan karena pemerintah menghadapi tekanan structural yang cukup hebat setelah berakhirnya masa "oil boom". Perubahan strategi industrialisasi ini mempunyai implikasi penting pada kehidupan buruh. Menurut Danu Rudiono (Prisma, Pembangunan yang berbasis strategi orientasi ekspor menuntut dipersiapkannya angkatan kerja industry yang disiplin serta upah dan kondisi kerja yang buruk, karena hanya dengan cara itu produk-produk kita bias bersaing di arena pasar internasional.

Untuk memudahkan aplikasi strategi itu maka pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan yang kurang menguntungkan buruh, tetapi sebaliknya memberikan ruang gerak yang lebih leluasa dan jaminan stabilitas kepada para pengusaha untuk melakukan akumulasi capital. Ada beberapa kebijakan yang secara langsung melemahkan posisi tawar buruh dan juga mempersempit ruang gerak buruh:

- a) Upaya-upaya yang secara sistematis melemahkan posisi tawar buruh dengan memandulkan serikat pekerja
- b) Tindakan represif dan intimidatif dari aparat keamanan terhadap kaum buruh yang dianggap potensial mengancam stabilitas nasional.
- c) Prosedur penyelesaian konflik perburuhan yang menutup ruang gerak pihak lain untuk ikut secara formal menangani masalah perburuhan. Birokrasi penyelesaian juga terlalu panjang. Dalam kondisi seperti ini hampir selalu buruh kalah sebelum vonis dijatuhkan
- d) Potensi untuk berkembangnya solidaritas dan militansi buruh secara sistematis dicabik-cabik, baik oleh aparat perusahaan maupun oleh aparat keamanan.

Pada tingkat internasional, buruknya kehidupan buruh juga bias dikaitkan dengan fenomena relokasi industri. Industri-industri yang polutif dan mahal (karena meningkatnya biaya produksi komponen upah) di Negara-negara NICS

berpindah lokasi ke negeri-negeri sedang berkembang, termasuk Indonesia. Kombinasi antara keunggulan komparatif berupa upah rendah dan masih lemahnya peraturan tentang lingkungan hidup member peluang besar bagi terjadinya relokasi industri.

Ketiga, pengetahuan dan kesadaran buruh tentang undang-undang dan peraturan ketenagakerjaan masih lemah. Ini sangat kondusif bagi pengusaha yang punya kepentingan untuk meraih keuntungan sebanyak-banyaknya. Karena kelengkapan pengetahuan buruh tentang hak-hak mereka yang mesti dipikul pengusaha berarti potensial meningkatkan biaya produksi. Dalam beberapa kasus terlihat jelas bahwa pengusaha berupaya supaya buruh jangan banyak tahu tentang hal itu. Buruh yang sadar dan banyak tahu biasanya tidak disukai, dan malah secara sistematis dikucilkan. Respon pengusaha terhadap pembentukan PUK sangat rendah. Ini menunjukkan bahwa kesadaran buruh akan hak-haknya akan merepotkan pengusaha baik secara ekonomi maupun politis. Toleransi terhadap ketidaktahuan buruh tentang hal itu hanya akan menyuburkan penindasan. Sayangnya, memang banyak buruh yang belum tahu bagaimana ketentuan upah lembur, jam kerja, dan lain-lain.

Keempat, kekuatan internasional belum bias dimanfaatkan secara optimal. Dalam beberapa kasus, dan sifatnya individual; kekuatan internasional seperti bekerja sangat efektif. Konon pembebasan muhtar Pakpahan, ketua SBSI, juga dikaitkan dengan adanya tekanan internasional. Tapi secara umum memang kekuatan seperti itu belum bisa dikatakan berhasil mempengaruhi peningkatan kondisi kerja. Sekali dua kali, memang pernah terdengar ancaman dari Amerika terhadap regim nasional, untuk segera melakukan perbaikan kondisi ketenagakerjaan di tanah air; berkaitan dengan kebebasan berorganisasi, hak berserikat, ketentuan upah minimum, intervensi aparat keamanan dalam perselisihan perburuhan dan lain-lain, kalau tidak mereka mengancam akan mencabutfasilitas GSP. Tapi bobot ancaman itu tampaknya kurang serius, karena pada kenyataannya, fasilitas itu uterus diperpanjang, sekalipun tidak terlihat adangan perubahan kondisi buruh secara substansial.

Kesemua gambaran itu memperlihatkan bahwa politik perburuhan yang dibangun selama ini menempatkan buruh sebagai modal dan bahan bakar industrialisasi akan tetapi pada saat yang sama mereka dijinakkan supaya tidak bias menuntut hasil pembangunan itu lebih besar. Itu diciptakan melalui kontruksi hubungan Negara-buruh-pengusaha yang ada tidak adil dan egaliter.

Kita selalu digoda untuk bertanya; kapan potret muram buruh kita akan berakhir? Pertanyaan ini tidak mudah dijawab karena memang masalahnya kompleks. Dalam arti kita akan dihadapkan kepada pilihan kebijakan; mau memihak buruh atau pengusaha. Tapi pilihannya tidak hitam putih seperti itu. Kita sudah bias menduga bahwa pemihaka kepada salah seorang mempunyai implikasi social, ekonomi dan politis yang cukup berat. Kondisi yang sekarang ada mencerminkan pemihakan yang jelas dari pemerintah kepada pengusaha. Kalau urutan ini dibalik, dimana pemerintah memihak buruh, juga akan menimbulkan suasana yang kurang menguntungkan pembangunan. Pemihakan yang sifatnya hitam-putih, kadang tidak selalu menghasilkan yang terbaik. Lagi

pula akhirnya soal pemihakan ini juga bermuara pada persoalan pemerataan versus pertumbuhan.

Oleh karena itu, kita perlu mencari suatu upaya yang memungkinkan dimana pertumbuhan jalan terus, tanpa harus mengorbankan pemerataan. Alias pemihakan kepada pengusaha dimungkinkan tanpa harus mensubordinasikan buruh pada kepentingan pertumbuhan. Formulasi ini mempunyai implikasi penting dimana pemerintah harus menilai kembali posisinya dalam hubungan industrial. Juga berarti pemerintah harus mempunyai kebijakan baru, politik perburuhan baru yang bias menjamin dan mengakomodasikan kepentingan buruh dan pengusaha. Ini tidak begitu sulit. Persoalannya pemerintah mau atau tidak melakukan itu. Atau, kita harus menunggu dan kemudian secara aktif menggerakkan dinamika yang terjadi dalam masyarakat, sehingga pemerintah akhirnya 'didorong' untuk mau mengambil langkah itu.

Saat ini kebijakan yang mengakomodasikan kepentingan pengusaha sudah banyak dibuat. Konon berbagai kebijakan itu muncul dari proses kolusikalangan birokrat dan pengusaha. Yang kita perlukan sekarang ini adalah kebijakan yang lebih mengakomodasikan kepentingan buruh. Untuk yang terakhir ini, tak mungkin lahir lewat aliansi birokrat dengan buruh. Birokrat hamper dipastikan tak mendapat apa pun beraliansi dengan buruh. Demikian halnya dengan partai politik, karena keterbatasan dan tuntutan akomodasi dengan ritme kuasa yang ada, maka sulit bagi kita untuk menaruh harapan; bahwa partai politik mampu memperbaiki situasi yang ada.

Karena itu jalan yang masih memberikan harapan adalah sebuah aliansi antara buruh dengan organisasi non pemerintah. Emil Salim memperkirakan, untuk ke depan, peranan ornop akan semakin kuat. Dalam arti peranan mereka akan semakin penting untuk mempengaruhi proses formulasi kebijakan.

Dalam konteks seperti itulah aliansi antara buruh dan organisasi non pemerintah mesti ditata kembali; pertama, mencari format kerjasama yang jelas diantara ornop perburuhan, kedua, mencari area strategis yang menjadi titik penting bagi ornop untuk melakukan "intervensi", ketiga, mengkaji ulang efektifitas pendampingan dan pembinaan yang selama ini dilakukan, dan keempat, menggali potensi dan sumberdaya (dana dan manusia) untuk menunjang kerangka aliansi yang akan dibangun. Memperjelas dan memperkuat konstruksi hubungan dan kerjasama antara ornop dengan buruh akan memberikan nuansa yang berbeda pada konstelasi institusi perburuhan yang sekarang ini ada. Tentu dengan harapan, konstelasi yang baru nanti, lebih kondusif bagi upaya peningkatan kesejahteraan buruh.

Beberapa Catatan Soal Pemogokan

Oleh : **Fauzi Abdullah**
Koordinato LIPS, Bogor

Pengantar

Dalam tulisan ini saya berusaha untuk membahas dua soal penting yang sangat kuat berkaitan, yaitu cara melihat aksi (terutama tuntutan buruh) yang hamper selalu dilakukan secara positif (hanya dilihat apa yang dikehendaki buruh) dan pengetahuan normative yang menurut hemat saya cukup membingungkan. Biasanya kedua soal itu hamper selalu bergandengan. Apa yang dikehendaki buruh dan apakah yang dikehendaki itu berada dalam atau diluar ketentuan normative. Atas dasar itu kemudian penilaian dilakukan. Ada yang menilai bahwa jika tuntutan masih dalam batas normative, maka itu dianggap wajar, tidak ditunggangi, dan sebagainya. Ada pula yang menilai bahwa jika masih dalam batas normative maka tingkat tuntutannya masih dalam batas-batas “mempertahankan hidup (survival) saja” belum meningkat ke yang lain.

Aksi pada dasarnya adalah bentuk perlawanan, pengucapan dari perasaan dan penilaian negatif atas situasi yang dialami. Dari sini bahasa yang digunakan bukan hanya verbal, tetapi juga bentuk lain dari pengucapan seperti gerak, suara dan sebagainya. Ketika buruh melakukan aksi menuntut upah, mereka mungkin juga mengucapkan perlawanan terhadap pola manajemen otoriter dengan teriakan atau bahkan dengan cara bersama-sama membelakangi manajer personalia ketika sang manajer hendak bicara. Yang terakhir ini biasanya tidak terekam. Oleh karena itu sangat sulit untuk dibahas secara rinci.

Dalam tulisan ini, yang dibahas adalah tuntutan yang umumnya tertulis dengan cara melihatnya sebagai bentuk perlawanan. Dengan demikian tuntutan mencerminkan apa yang dilawan, siapa/pihak mana saja yang menjadi sasaran perlawanan dan bagaimana cara melawannya (cara aksi dilakukan).

Istilah normative sebagai kategori tuntutan Nampak di permukaan sebagai kategori yang jelas dan baku karena sering dan luasnya penggunaan kategori itu. Kategori yang sejauh pengetahuan saya diperkenalkan oleh pemerintah ini, mengandung keracunan yang cukup membingungkan. Secara harafiah, kata sifat ini merujuk pada kategori tuntutan yang didasarkan pada norma-norma yang berlaku. Justru di tingkat norma dan pelaksanaannya inilah keracunan terjadi. Dalam soal upah misalnya; UUD 45 menyatakan bahwa warga Negara berhak untuk hidup layak secara kemanusiaan. Begitu juga dengan U nomor 14/1969 menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak atas penghasilan yang layak bagi kemanusiaan. Peraturan Pemerintah Nomor 8/1981 dalam penjelasannya menyatakan bahwa fungsi upah adalah untuk menjamin kesejahteraan buruh beserta keluarganya.

Ketika norma ini diterjemahkan secara konkrit dalam bentuk peraturan upah minimum, maka yang dijadikan ukuran menentukan UMR antara lain Kebutuhan Fisik Minimum dan itupun untuk lajang. Ironisnya yang dianggap sebagai norma bukan UUD, bukan UU, bukan pula peraturan pemerintah, malah keputusan menteri. Begitu pula dengan tuntutan untuk membubarkan PUK SPSI oleh sebagian buruh pabrik tertentu (PT, Gajah Tunggul di tahun 1991, PT. Great River baru-baru ini) sebetulnya ada dasar normatifnya, yaitu: pasal 28 UUD 1945, pasal 11 UU nomor 14/1969 yang menyatakan bahwa buruh berhak untuk masuk atau membentuk serikat buruh dan serikat buruh dibentuk secara demokratis. Belum lagi disebut UU nomor 18/1956 yang melindungi ciri demokratik dari serikat buruh baik dalam proses pembentukan maupun dalam operasional. Akan tetapi ketika tuntutan itu muncul, maka ia tidak masuk dalam kategori normative, malah dianggap “berpolitik”, suatu cap yang dapat mendatangkan konsekuensi.

Tuntutan buruh PT. GRI

Dari sisi ini menarik untuk mengamati tuntutan buruh PT. GRI yang baru-baru ini melakukan pemogokan. Sebagian tuntutannya mirip dengan tuntutan buruh pabrik lain. Sebagian bersifat spesifik. Yang jelas tuntutan itu dimulai dengan pengantar sangat singkat yang menjelaskan bahwa strategi kapitalis yang terutama mereka lawan, yaitu strategi untuk disatu pihak menekan upah sebagai bagian dari biaya produksi (hak-hak kesejahteraan tidak pernah diberikan), dipihak lain memacu produktivitas dengan berbagai cara; member insentif dalam system pengupahan, lembur paksa, system target, dipersulit cuti, pola pengendalian proses produksi secara keras dan sebagainya. Untuk itu dirumuskan tuntutan sebagai berikut:

1. Yang berkenaan dengan soal upah dan kesejahteraan; UMR ditetapkan sebagai upah pokok saja dengan jumlah sama seperti aturan pemerintah, yaitu Rp. 4600,- ditambah dengan tunjangan makan Rp. 1500,-, tunjangan perumahan Rp. 15000, perbulan, pakaian seragam, jaminan kesehatan.
2. Yang berkenaan dengan pemberian cuti; tidak dipersulitnya pengambilan cuti haid dan cuti tahunan.

3. Yang berkenaan dengan hak berserikat; bubarkan PUK SPSI di perusahaan tersebut
4. Dan lain-lain

Cukup menarik untuk diamati bahwa walaupun dalam pengantar singkatnya disebutkan sederet cara pengusaha untuk memacu produktivitas (lembur paksa, produksi dikaitkan dengan target, sering dimarahi, dan sebagainya), yang muncul dalam bentuk tuntutan. Mungkin hal ini disebabkan oleh karena memang soal cuti itu yang dirasakan sangat berat, atau bahasa yang digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan tuntutan saat ini dianggap sebagai terbatas oleh buruh; yaitu bahasa yang legitisasi dari sisi peraturan perundangan yang berlaku (cuti misalnya). Diluar itu mungkin dianggap masih sulit untuk dikemukakan. Atau dengan kata lain, mungkin buruh dalam memilih prioritas tuntutan punya kecenderungan untuk mendahulukan tuntutan yang mempunyai landasan hukumnya. Jika perlu landasan hukum itu ditafsirkan sendiri dan bias berbeda dengan aturan yang berlaku (contoh: UMR).

Gugatan pada kebijakan pemerintah

Dengan merumuskan tuntutan seperti itu, nampak ada 4 hal yang digugat buruh dalam hak kebijakan pengusaha, yaitu;

1. Pengertian normatif. Dengan mengajukan tuntutan soal upah seperti di atas (apalagi dengan menggunakan istilah UMR,serta kebebasan berserikat,maka terbuka perdebatan mengenai keluasan pengertian normatif. Pengertian normatif yang biasanya dibatasi hanya pada hal-hal yang bersifat ekonomis saja (itupun dalam pengetian terbatas), kini diartikan secara lebih luas (hak berserikat)
2. Dengan tuntutan itu sebetulnya buruh menolak kebijakan untuk hanya mempunyai satu serikat buruh di tingkat nasional
3. Defini UMR juga merupakan soal yang digugat oleh buruh. UMR yang sejak tahun 1990-an diubah kandungannya menjadi upah pokok (paling sedikit 75%) ditambah tunjangan tetap (25%), ditentang dengan cara menuntut UMR sebanyak Rp. 4600,- sebagai upah pokok saja dan dalam butir lain menuntut tunjangan makan. Mengidentifikasi UMR sebagai upah pokok saja, bukanlah soal baru. Sebelum tahun 1990-an, UMR didefinisikan hanya sebagai upah pokok saja oleh pemerintah.
4. Dengan tuntutan seperti itu, sesungguhnya buruh juga menentang kebijakan upah rendah

Beberapa reaksi

Pengusaha menolak untuk berunding dengan utusan buruh, malah melakukan perundingan dengan PUK SPSI yang nyata-nyata sudah tidak dipercaya buruh. Hasil perundingan itu antara lain menyatakan bahwa tuntutan buruh akan

ditampung dan akan dibicarakan dalam perundingan pembaharuan Kesepakatan Kerja Bersama beberapa bulan kemudian. Sementara itu Dirjen Binawas menyatakan bahwa aksi itu sudah bermuatan politis dan penyelesaiannya akan dikoordinasikan dengan instansi terkait. Dirjen Binawas juga menyatakan bahwa PT. GRI telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

Catatan Penutup

Sifat konflik perburuhan setidak-tidaknya yang tercermin dalam kasus PT. GRI masih dalam kerangka peraturan perundangan yang berlaku. Yang ditentang buruh nampaknya adalah strategi modal dan sebagian kebijakn pemerintah dalam lapangan perburuhan. Dari sisi buruh Nampak bahwa tuntutan yang diajukan adalah tuntutan yang mempunyai dasar hukum, sementara pemerintah nampaknya berpegang pada kebijakannya sendiri dan memberinya sebagai "normatif". Dialog Nampak tidak terjadi baik pada tingkat perusahaan maupun pada tingkat yang lebih tinggi.



BAHASAN UTAMA

Krisis Perburuhan dalam Hubungan Industrial di Indonesia

Oleh : **Juni Thamrin**
Peneliti AKATIGA

1. Pendahuluan

Sebagai Negara yang sedang berusaha memasuki era industrialisasi, Indonesia menghadapi dua persoalan besar, pertama penataan hubungan industrial yang adil dan setara, kedua, penempatan posisi dalam struktur produksi internasional. Hubungan industrial menggambarkan dinamika relasi-relasi social antara modal dan buruh dalam produksi dan peran tertentu yang dijalankan oleh Negara untuk melakukan stabilisasi atas relasi produksi tersebut. Dalam pengertian ini meliputi seluruh perilaku dan relasi-relasi yang dijalankan oleh semua orang atau organisasi yang mempunyai kepentingan terhadap proses produksi (Thomas and Waterman, 1980; Aguilar Virginia, 1989). Dalam arti luas, hubungan industrial menyangkut berbagai kebijakan Negara yang turut mempengaruhi proses produksi.

Sementara struktur produksi internasional, merupakan relasi produksi yang duwujudkan melalui tindakan ekonomi politik tertentu, yang mengembangkan pola pembagian kerja internasional. Dasar pembagian kerja tersebut, pada awalnya lebih ditentukan oleh factor keunggulan komparatif dari masing-masing Negara, terutama ketersediaan faktorproduksi alamiah, sehingga ada Negara agraris dan Negara industri. Saat ini dasar pembagian kerja seperti ini telah bergeser, dimana determinan utama pembelaan (bukan pembagian kerja lagi) adalah penguasaan atas aset-aset produksi dan distribusi. Agenda utama dari pembagian kerja internasional baru ini – bungkus lain dari pembedaan kategori Negara – ditentukan oleh penguasaan modal, teknologi, penguasaan pasar dan sumberdaya alam. Negara-negara yang menguasai aset produksi dan distribusiglobal dapa menentukan, pada tingkat mana taraf industrialisasi akan mereka jalankan sendiri atau perlu direlokasikan ke Negara-negara berkembang.

2. Fenomena Hubungan Industrial

Relasi buruh, modal dan Negara, dalam konteks indutrialisasi yang saat ini sedang ditapaki oleh Indonesia yang secara formal dikemas dalam jargon

Hubungan Industrial Pancasila, ternyata mengandung banyak dimensi yang ujungnya bermuara pada tindakan tarik menarik serta saling memberikan pengaruh. Posisi politik dan ekonomi dalam konfigurasi kebijakan Negara serta kemampuan artikulasi dari masing-masing actor – biasanya dicerminkan melalui kemampuan organisasi – sangat dominan memberikan kontribusi terhadap bentuk dan isi serta penafsiran dari pola relasi tersebut secara faktual.

Dimensi utama hubungan **buruh – modal** sangat ditandai oleh penerapan proses kerja yang intensif dan disertai dengan proses pendisiplinan buruh yang ketat dari pihak pengelola modal. Hal itu dijalankan dengan mengintegrasikan buruh pada politik produksi yang bersifat kapitalistik, melalui cara produksi “ban berjalan” yang sangat mengoyak dimensi keutuhan manusia dan mereduksi keahlian (melalui manajemen produksi *fordism dan tailorism*). Penerapan pola produksi yang seperti itu secara langsung dapat mendongkrak produktivitas atau paling tidak, dapat mempertahankan tingkat produktivitas minimum secara konstan. Dampak yang dirasakan oleh buruh adalah terjadinya proses pengasingan mereka dari komunitas sosialnya. Hal itu yang merupakan penyumbang terbesar dalam proses pembodohan dan pemiskinan dikalangan buruh.

Secara antagonistic situasi dan kondisi kerja yang demikian mendapatkan respons perlawanan dari pihak buruh, baik berbagai bentuk perlawanan terorganisir seperti pemogokan maupun perlawanan harian yang bersifat sporadis dan spontan. Pasang surut bentuk perlawanan buruh dalam relasinya dengan modal, dipertajam oleh situasi eksternal. Terutama tekanan biaya hidup, perlakuan pihak manajemen yang tidak manusiawi maupun tekanan psiko-sosial sehari-hari.

Dimensi relasi **buruh-negara** sangat didominasi oleh proses pengerasan ideologi dominan anti komunis, untuk tujuan pengendalian tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut dicirikan dengan dua pendekatan utama, yaitu : pertama, mengembangkan pendekatan keamanan di sector perburuhan, dan kedua, mengembangkan label legitimasi yang bersandar pada jargon menjamin terciptanya stabilitas untuk mencapai produktivitas nasional.

Implementasi kedua jargon ini diwujudkan dalam bentuk, yaitu : (1) mempertahankan tingkat upah buruh rendah sebagai daya tarik investasi, (2) mengimplementasikan prinsip *military dictatorship* dalam wajah baru, (3) mengeliminasi dan mereduksi peluang terciptanya aliansi proletariat dengan jalan memperkecil peluang bertemunya kelompok-kelompok prodemokrasi dengan kelompok buruh atau dengan kelompok marginal lainnya, (4) mengintegrasikan dan membatasi pertumbuhan organisasi buruh secara “authoritarian” di bawah control institusi Negara, (5) mengontrol penempatan kepengurusan organisasi buruh yang direstui pemerintah serta (6) mengembangkan *discourse* (berupa pengetahuan, bahasa dan idiom) dalam perspektif dominatif penguasa dan berbentuk *subjection*, yakni menjadikan kelompok buruh menjadi objek pengendalian dan control. Keseluruhan kerangka relasi *buruh-negara* ini memberikan ruang gerak yang besar bagi

operasi akumulasi capital melalui organisasi produksi yang dijalankan secara missal oleh buruh.

Pada sisi lain, relasi *modal-negara* merupakan pola hubungan mutualistik. Dalam konteks ‘modernisasi’ Negara mendapatkan dukungan modal yang besar untuk menjalankan dan memelihara kekuasaannya. Sebagai salah satu sumber pendapatan utama Negara, proses kerja yang cenderung eksploitatif (untuk menekan biaya produksi dan memperbesar margin keuntungan) yang dijalankan di dalam proses produksi, tidak menjadi persoalan besar, sepanjang tidak mengganggu kelancaran arus dukungan financial yang telah berjalan selama ini atau sepanjang tidak mendapat perlawanan keras yang terorganisir dari buruh yang secara potensial dapat meruntuhkan legitimasi formal.

Kondisi seperti ini terutama terjadi di Negara-negara yang posisi tawar rakyatnya sangat lemah *via—vis* Negara dan modal, atau Negara yang mempunyai situasi *labour surplus*, seperti Indonesia. Dalam situasi dimana Negara sangat menempatkan proses industrialisasi sebagai bantalan devisa utama – terutama yang dibangun atas dukungan hutang luar negeri – investasi (modal) mendapatkan perlakuan yang sangat istimewa.

Sementara itu logika utama (pemilik) modal adalah akumulasi. Dalam paradigm seperti itu, selutruh dimensi produksi berisi penaklukan dan penguasaan. Baik penguasaan terhadap sumberdaya alam, tenaga kerja, tanah, pasar, teknologi maupun organisasi produksi. Perilaku modal terhadap alat-alat produksi termasuk buruh sebagai tenaga kerja adalah perilaku regulative instrumental. Di sisi lain, modal mensyaratkan untuk diperlakukan oleh Negara secara de-regulatif. Wujud yang paling menonjol saat ini berupa: (1) makin dihapuskannya berbagai bentuk regulasi dan birokrasi, (2) diciptakan berbagai infrastruktur produksi dan ekspor yang makin memadai, (3) memangkas hamper seluruh hambatan impor, khususnya bagi investasi yang berorientasi ekspor, (4) mamberikan fasilitas pengurangan pajak dan (5) membuka ruang gerak yang lebih luas bagi organisasi pemilik modal.

3. Pasang Surut HIP

Hubungan industrial Pancasila (selanjutnya disebut HIP) di Indonesia, mengalami dinamika yang sejalan dengan perubahan politik-ekonomi makro. Masalah perburuhan sangat sarat dengan masalah politik, perkembangan ekonomi dan ideology. Secara umum hubungan industrial ini terdiri dari dua dimensi utama, norma dan praksis.

Secara normative, pendefinisian HIP mencermnkan kerangka konsepsi terhadap posisi, arah dan tingkat modernisasi seperti apa yang hendak dicapai oleh rezim industri yang dianggap secara umum dapat menguntungkan Negara. Dengan demikian HIP didefinisikan dan ditafsirkan dengan menggunakan paradigm yang mendukung proses industrialisasi untuk mencapai tingkat pertumbuhan tertentu dalam proses pembangunan.

Norma-norma relasi dan perilaku actor ekonomi produksi yang dirumuskan dalam hubungan industrial ini mempunyai muara pada aspek ekonomi berupa pertumbuhan industri dan secara cultural-politik berupa pengendalian kekuatan massa buruh yang tunduk dalam korporatisme Negara. Dalam kerangka HIP, peran Negara mendapatkan legitimasi yang besar untuk mendefinisikan perilaku buruh, pengusaha (modal) dan kekuatan institusi lainnya. Peran dan posisi buruh didefinisikan berhubungan secara harmoni dalam satu keluarga bersama majikan dan menjadi salah satu aset produksi dalam pertumbuhan industry.

Dalam kondisi seperti itu, tingkah laku buruh, secara normative tidak boleh bertentangan dan berbenturan dengan berbagai upaya pertumbuhan industry. Termasuk tidak boleh bertentangan dengan majikan, karena majikan merupakan anggota keluarga buruh. Semua gejala pertentangan dan gejala disharmoni, harus dihindarkan dari pola relasi HIP. Asumsi dasar HIP adalah keharmonisan dan tidak mengenal adanya perbedaan bahkan pertentangan kepentingan, motivasi dan tujuan dari "anggota keluarga HIP". Asumsi inilah yang mendasari semua jargon serta pidato-pidato resmi pejabat Negara. Sosialisasi asumsi normative HIP ini dikembangkan melalui upaya pendidikan massa, lokakarya, penyuluhan dan ekpose pers.

Pada sisi empiric, praktek hubungan industrial merupakan *resultante* dari kekuatan-kekuatan nyata di lapangan. Gerakan buruh yang terorganisir ataupun pemogokan buruh, kekuatan control aparat keamanan, kekuatan modal internasional, lobi pengusaha, tekanan organisasi buruh internasional, peraturan daerah maupun peraturan sektoral merupakan bentuk-bentuk kekuatan nyata yang berpengaruh besar pada dimensi nyata hubungan industrial. Sehingga secara factual, terjadi tarik ulur terhadap pengendalian buruh di lapangan.

Pada kurun waktu tertentu, control aparat keamanan terhadap gerakan buruh tidak terlalu ketat, karena misalnya pemerintah sedang menghadapi tekanan internasional yang berkaitan dengan ancaman Amerika untuk mencabut fasilitas GSP. Atau masalah perburuhan dalam negeri sedang mendapat sorotan tajam dalam sidang-sidang organisasi buruh internasional. Dalam waktu lain, cengkeraman pengendalian keamanan sangat optimal, karena ada desakan investasi asing untuk meminta jaminan stabilitas agar modal mereka bias aman beroperasi di Indonesia atau mereka dapat dengan aman melakukan relokasi industri.

Dinamika hubungan industrial, dalam konteks perkembangan wilayah juga sangat dipengaruhi oleh tingkat perlawanan buruh dan ekpose media massa serta regulasi dari pemerintah daerah. Di Wilayah-wilayah konsentrasi industry seperti Jabotabek, Gerbangkertasusila, Bandung Raya, Ruas Semarang-Ungaran dan Medan, hubungan industrial sangat dinamis. Dalam arti, tuntutan buruh terhadap pemenuhan hak-hak normative merekarelatif lebih mudah dipenuhi dibandingkan dengan tuntutan buruh yang bekerja di wilayah lain. Penyesuaian tingkat upah minimum regional dilakukan lebih cepat dibanding wilayah lain.

Faktor utama yang mendorong situasi yang “relatif” menguntungkan buruh ini, antara lain adalah maraknya gelombang pemogokan (Tabel) dan cepatnya ekspose media massa terhadap gerakan buruh tersebut. Situasi yang sangat berbeda terjadi pada pola hubungan industrial di daerah industry yang sepi dari liputan media massa atau relative sepi dari gerakan pemogokan buruh, misalnya di Lampung, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Timur dan berbagai daerah konsentrasi industry perkayuan di wilayah Indonesia Timur. Di daerah seperti itu, mekanisme peninjauan upah minimum regional sangat lamban dilakukan, sehingga rata-rata upah buruh sangat lambat mengalami penyesuaian kenaikan, sekalipun tingkat inflasi berjalan dengan pasti.

Sedangkan aspek regulasi daerah, lebih banyak merujuk pada dinamika pemanfaatan sumber dana keuangan perusahaan untuk mendukung kegiatan kestra yang dijalankan oleh aparat pemerintah setempat.¹ Beberapa regulasi yang dijalankan oleh pemerintah daerah yang kemudian berkaitan dengan dinamika hubungan industrial, antara lain berkaitan dengan perizinan lokasi, ketentuan untuk mengintegrasikan potensi local dalam produksi, pengawasan penggunaan air tanah dan pengawasan tentang dampak lingkungan. Regulasi tersebut secara langsung tidak ada pengaruhnya dengan pengendalian buruh, tetapi isu itu sering digunakan pada waktu terjadi konflik perburuhan.

Tabel 1. Gambaran Kasus-kasus Pemogokan dan Unjuk Rasa Buruh Menurut Propinsi Yang direkam Oleh Kantor-kantor Wilayah (Kanwil), antara periode 1992 sampai Bulan Mei 1994.

No	Propinsi (Kasus)	1992 (kasus)	1993 (kasus)	1994 (kasus)
1	DKI Jakarta	52	45	53
2	Jawa Barat	107	84	104
3	Jawa Tengah	7	4	8
4	Jawa Timur	50	46	112
5	Sumatera Utara	25	1	4
6	Sumatera Barat	1	0	0
7	Riau	0	1	2
8	Jambi	1	0	3
9	Bengkulu	1	0	0
10	Kalimantan Barat	0	1	1
11	Kalimantan Timur	6	3	3
12	Sulawesi Selatan	1	0	0

¹ Menurut seorang informan dari pemerintah daerah Jawa Barat, di instansi dimana ia bekerja ada daftar perusahaan yang telah biasa dimintakan sumbangan untuk mendukung berbagai kegiatan yang dilakukan instansinya. Daftar tersebut disusun berdasarkan besarnya sumbangan yang biasa mereka terima dan alokasi sumbangan untuk kegiatan tertentu. Menurut informan ini, timbale balik dari situasi seperti ini adalah mereka memberikan berbagai kemudahan perusahaan tersebut, terutama yang menyangkut urusan yang dihadapi perusahaan yang berkaitan dengan wewenang mereka

Jumlah	251	185	290
--------	-----	-----	-----

Sumber : Departemen Tenaga Kerja RI, Mei 1994

Faktor lain yang menunjang pasang surut pengendalian hubungan industrial, adalah dinamika kompetisi dan kolaborasi di antara para pengusaha untuk mendapatkan akses dan fasilitas Negara. Struktur industry yang umumnya menjalankan pola sub-kontrak internasional, para industrialis yang menghasilkan prosuk missal di Indonesia (seperti garmen, tekstil,sepatu), tidak berdiri sendiri. Mereka menjalankan proses produksinya berdasarkan order sub-kontrak, yang didapatkan melalui serangkaian kompetisi dengan sesama industrialis sejenis. Kompetisi tersebut, pada masa tertentu sangat berpengaruh terhadap pola relasi industrial, terutama relasi dengan buruh.

Ketika batas waktu *deadline* produksi untuk ekspor hamper terlampaui, maka tekanan dan control kerja sangat tinggi. Begitu juga dengan indutrialis yang mendapatkan order yang beragam dalam satu satuan waktu yang sama, akan membangun pola relasi yang berbeda dengan industrialis yang hanya mendapat order tunggal dari pihak principal luar negeri. Pola hubungan industrial di wilayah kompleks industry sejenis dimana para industrialisnya telah membangun hubungan informal yang sangat erat diantara sesama mereka, ternyata menghasilkan tekanan control terhadap buruh yang cukup ketat.

Di beberapa wilayah konsentrasi industri tekstil dan garmen di Bandung Raya, ternyata para pengusaha itu telah mempunyai mekanisme pertemuan rutin mingguan untuk mengevaluasi perilaku buruh-buruhnya dan saling menginformasikan perilaku tersebut. Sehingga mereka telah mempunyai daftar "hitam" bagi beberapa buruh yang dianggap "merongrong" perusahaan.¹ Bagi buruh yang telah masuk dalam daftar hitam tersebut setelah kena PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) di suatu perusahaan akan sulit pindah kerja ke perusahaan serupa di wilayah tersebut. Satu-satunya jalan adalah pindah ke wilayah industry lain atau pindah kerja dalam jenis industri lain.

Pengusaha yang mempunyai mekanisme hubungan informal seperti ini adalah para pengusaha yang mempunyai karakteristik sebagai berikut: (1) mereka merupakan pengusaha yang mempunyai hubungan sub-kontrak order (baik vertical maupun horizontal) atau kaitan produksi hulu-hilir, (2) pengusaha yang berada dalam satu naungan group usaha yang sama, (3) pengusaha yang mempunyai kedekatan lokasi usaha (bertetangga), (4) pengusaha yang masih mempunyai hubungan kekeluargaan dan (5) para pengusaha yang mempunyai orientasi politik yang sejenis atau mereka yang mempunyai kelompok/club tersendiri.

¹ Informasi ini berdasarkan hasil diskusi dengan dua orang pengusaha tekstil dan garmen di wilayah Dayeuh Kolot Bandung. Dua pengusaha ini menyatakan pertemuan rutin informal itu biasanya dilakukan dalam suasana makan siang bersama. Pertemuan itu tidak hanya memperbincangkan kondisi buruh mereka masing-masing, tetapi juga membicarakan masalah order pekerjaan dan masalah eksternal lainnya.

4. Persoalan Yang Menghambat Pelaksanaan HIP

Sekalipun masa industrialisasi Indonesia telah cukup lama dimantapkan, setidaknya dimulai pada masa penetapan Undang-Undang Penanaman Modal Asing (PMA) dan PMDN, tahun 1967-1968, dan dimantapkan dengan konsepsi HIP yang diintroduksi pada awal decade 70-an, perselisihan industrial tidak menunjukkan gejala mereda, bahkan sebaliknya. Terutama pada akhir decade 80-an dan awal 90-an ini. Model peristiwa pemogokan akbar terjadi berturut-turut dimulai pada kasus pemogokan PT. Great River, peristiwa pemogokan buruh perempuan di Solo, pemogokan buruh di kelompok perusahaan PT. Gajah Tunggul, pemogokan buruh di Medan dan Siantar dan kembali pemogokan akbar buruh PT. Great River, menorehkan pertanyaan besar; mengapa hal itu terjadi? Mengapa HIP tidak dapat dijalankan dengan baik dan benar ?

Implementasi dan aktualisasi HIP mengalami hambatan struktural yang serius. Sebagian merupakan persoalan internal dan sebagian lain merupakan konstalasi eksternal. Persoalan-persoalan yang menjadi penghambat utama implementasi HIP di Indonesia adalah sebagai berikut :

4.1. Intervensi pemerintah terlalu jauh dan kurang seimbang dalam menata hubungan industrial, terutama dalam menata organisasi buruh terlalu ketat, organisasi buruh kurang mendapat kesempatan untuk membangun organisasi diluar SPSI. Sementara keleluasaan berorganisasi sangat luas diberikan pada tingkat pengusaha. Beragam organisasi pengusaha (mulai organisasi sektoral, wilayah, primordial dan berbagai aliran) mendapat kesempatan tumbuh sebagai wadah ekspresi dan lobi (ada KADIN, APINDO, wadah pengusaha untuk setiap cabang produksi, ada HIPMI dan beragam organisasi pengusaha lainnya).

4.2. Pengaturan organisasi buruh dilakukan secara *top-down* dan hirarkis, bukan pengkoordinasian dari bawah ke atas, yang dijalankan oleh kaum pekerja. Organisasi buruh berorientasi pada kebutuhan Negara bukan pada kebutuhan riil buruh, untuk menjadi saluran bagi persoalan social, ekonomi dan politik mereka sendiri. SPSI secara umum belum dapat mejadi wadah yang dirasakan menguntungkan buruh dan tidak dapat berperan proaktif menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh pada buruh.

4.3. Pemimpin organisasi buruh tidak berasal dari kalangan pekerja dan tidak didasarkan atas pemilihan dari bawah yang demokratis, tetapi dirujuk oleh penguasa dari kalangan poitisi (organisasi politik dominan) atau dari kalangan pengusaha dan militer. Penempatan pemimpin organisasi buruh yang demikian, tentunya sangat sulit diharapkan dapat membela dan menyuarakan aspirasi buruh.

4.4. Ada campur tangan militer dalam hubungan industrial yang mendistorsi proses penyelesaian perselisihan industrial. Keterlibatan militer

dalam proses produksi sangat jauh, mulai dari proses produksi sampai pemutusan hubungan kerja di tingkat perusahaan.

4.5. Peranan pemerintah sebagai pengawas dalam HIP sangat minimal, hal ini diakibatkan karena kurangnya tenaga pengawas industrial yang professional (Secara kuantitatif dan kualitatif), tidak adanya *public accountability* atas tugas yang dijalankan, tidak dilibatkan masyarakat luas dalam urusan ini.

4.6. Konsepsi normative HIP tidak realistis, terutama yang memandang buruh majikan dalam satu keluarga mempunyai kepentingan yang sama untuk membangun Negara. Hubungan mereka (kalau tidak ingin dikatkan antagonistik), mempunyai dimensi kepentingan yang berbeda. Musyawarah dan mufakat tidak akan dapat menjadi instrument utama mempertemukan perbedaan kepentingan apalagi perselisihan industrial. Kalaupun dipaksakan, hal itu akan bersifat *adhock* dan permukaan. Penegakan hokum yang adil dan perimbangan kekuatan organisasi merupakan jalan keluar yang paling realistis.

4.7. Masih berakarnya mekanisme kolusi dan korupsi sehingga mengakibatkan peningkatan biaya siluman menjadikan sebagian industry kita tidak efisien. Berikut ini dapat diikuti beberapa bentuk/jenis yang termasuk biaya siluman,¹ yang jumlahnya diperkirakan sekitar 30% dari total biaya produksi, yaitu:

4.7.1. *Uang keamanan*, yang bervariasi jumlah dan peruntukannya (baik untuk lembaga keamanan resmi dan pranata tidak resmi seperti jawara ataupun preman). Uang keamanan ini ada yang rutin setorannya dan ada yang bersifat incidental.

4.7.2. *Uang partisipasi*, dana ini diperuntukkan khusus untuk kegiatan-kegiatan yang berdifat "politik praktis" yang mengadakan kunjungan serja di sekitar wilayah industry atau menyangkut prestise pejabat daerah dimana industry tersebut berada. Misalnya kunjungan pejabat (terutama dari organisasi politik dominan) untuk temu kader, kunjungan gubernur, atau pejabat dari pusat, dan kunjungan pejabat dari setiap jenjang hirarkhi pemerintahan. Uang ini juga termasuk dana untuk "sangu" para pejabat atau istri pejabat yang punya urusan dan wewenang tentang promosi, perijinan ataupun punya kekuasaan formal yang berpengaruh terhadap keberadaan perusahaan. Sangu tersebut biasanya diberikan jika pejabat atau istri pejabat hendak melakukan perjalanan (dinas atau non dinas) keluar kota/luar negeri.

4.7.3. *Uang Pembangunan*, dana ini diperuntukkan membantu pembangunan fisik kantor atau sarana milik pemerintah atau yang direkomendasikan oleh penguasa.

4.7.4. *Uang Persahabatan*, dana ini diberikan pada pihak-pihak yang secara potensial dapat mengganggu jalannya proses produksi, mengganggu eksistensi perusahaan atau mengancam keberadaan dan keselamatan pengusaha tidak secara fisik. Misalnya uang untuk wartawan yang meliputi peristiwa sekitar usaha yang dijalankan, untuk petugas control dan pengawasan dari SPSI, Dinas-

¹ Jenis-jenis biaya ini didapat dari berbagai kesempatan wawancara dengan beberapa pengusaha di sekitar Bandung Raya. Menurut informasi lain (catatan dari LSM, yang belum dipublikasikan jenis biaya siluman ini tercatat sekitar 300 item.

dinas sektoral, maupun “perusuh” yang dapat menyebarkan informasi tentang isu perut perusahaan.

4.7.5. *Uang Pelayanan*, dana ini diperuntukkan pada mereka yang secara potensial dapat mempercepat proses pelayanan (mem-by pass) proses procedural dan birokrasi, yang menyangkut kelancaran arus barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan.

4.7.6. *Uang TST* (tahu sama tahu) alias Uang Jamak, dana ini diperuntukkan bagi mereka yang secara langsung menemukan pelanggaran dan kesalahan ‘fatal’ yang dilakukan oleh perusahaan. Misalnya perusahaan yang melanggar ketentuan pembuangan limbah, penyedotan air tanah dan sebagainya.

4.7.7. *Uang Pengendalian*, dana ini diberikan pada pihak-pihak yang dapat menemukan dan mencari tokoh buruh yang sering bersuara vocal atau buruh yang intensitas hubungan dengan pihak luar sangat tinggi.

4.7.8. *Uang Koordinasi terkait*, dana ini diberikan pada pihak-pihak terkait yang akan melakukan kegiatan rapat, diluar dari agenda rutin mereka dan berkaitan dengan perusahaan atau disekitar lokasi perusahaan.

4.7.9. *Uang Hadiah*, diberikan untuk keluarga pejabat tertentu atau pihak-pihak yang dapat mempermudah urusan yang berkaitan dengan ekspor, kuota, perijinan dan pemasaran produksi. Diberikan dalam momentum tertentu seperti ulang tahun perkawinan, ulang tahun anak kesayangan, hari raya, kenaikan kelas, tahun baru dan berbagai kegiatan monumental lainnya.

4.7.10. *Uang Perayaan Nasional dan daerah*, diberikan untuk menyumbang pada kegiatan perayaan yang dilakukan oleh berbagai instansi dan penguasa daerah akan hari-hari tertentu. Untuk kasus ini biasanya setiap instansi telah mempunyai daftar penyumbang tetap dari perusahaan yang ada di wilayah kerjanya.

4.7.11. *Uang Monitoring Rutin (atau uang “rutin”)*, dana ini diberikan untuk petugas-petugas yang melakukan monitoring, baik ada atau tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh perusahaan yang bersangkutan. Monitoring tersebut biasanya meliputi ketentuan keselamatan dan peralatan kerja, peraturan kerja, perburuhan, polusi dan kebisingan, pemanfaatan air, transportasi alat-alat berat, listrik dan lain-lain.

4.7.12. *Uang Terima Kasih*, dana ini diberikan untuk pihak-pihak yang telah lebih dahulu memberikan “bocoran” rencana pemerintah atau peraturan baru “analisis kecenderungan” perilaku kekuasaan tertentu, yang mempunyai kaitan dan relevansi terhadap peluang berusaha dan peluang bisnis terutama peluang pengembangan bisnis. Uang ini juga diberikan kepada mereka yang dapat menjadi mediator terhadap kemungkinan konflik yang dihadapi oleh perusahaan, misalnya konflik dengan masyarakat.

5. Penutup : Diperlukan Format Baru HIP

Krisis dalam hubungan industrial di Indonesia telah mendapat sorotan tajam dari dunia internasional dan perlawanan yang cukup keras dari kalangan buruh. Kritik tajam dari *Governing body ILO* yang bersidang pada bulan Juni 1989 dan

April 1995, mempersoalkan pelanggaran pemerintah Indonesia dalam penanganan hak-hak buruh untuk berserikat dan berorganisasi, pembatasan hak buruh untuk mogok, diskriminasi dan penahan pimpinan organisasi dan aktivis perburuhan Indonesia. Kritik tersebut tidak hanya datang dari lembaga resmi seperti ILO, tetapi juga banyak berdatangan dari serikat-serikat buruh Negara-negara yang mempunyai kepedulian terhadap nasib buruh di Indonesia maupun datang dari berbagai organisasi yang menjunjung tinggi pelaksanaan demokratisasi dan penegakan hak-hak asasi manusia di seluruh dunia.

Agaknya apabila Indonesia ingin mempertahankan upaya untuk menjalani transformasi structural dengan mengambil cara industrialisasi, maka diperlukan adanya format baru dalam HIP. Format tersebut harus menjamin adanya relasi antara buruh-modal dan Negara yang setara dan adil, dengan basis perekonomian buruh yang memadai. Penguatan ekonomi keyakinan (buruh) akan membantu meningkatkan kemampuan beli masyarakat bawah yang berarti pula membangun dasar industrialisasi yang kokoh. Fondasi tersebut sangat penting untuk membawa Indonesia jika ingin menjalani tahap “keberlanjutan pembangunan” (*sustainable development*). Beberapa syarat perlu diakomodir dalam HIP dalam rangka mengembangkan format hubungan industrial yang kondusif, yaitu:

(1). Perlu ada kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat bagi buruh, sebagai wahana untuk mendinamiskan potensi terpendam buruh dan untuk mempercepat proses pencerdasan bangsa. Hal ini juga penting untuk mendorong proses industrialisasi, dimana wakil organisasi pengusaha yang sangat pluralistic dapat diimbangi dengan kemampuan wakil-wakil dari organisasi buruh yang plural pula. Pemberian kesempatan berorganisasi yang luas bagi kalangan buruh akan menangkal kritik-kritik tajam dari luar negeri dan akan memberikan keuntungan diplomasi politik Indonesia di kancah Internasional.

(2). Perlu ada upaya penegakan hukum yang konsisten atas berbagai bentuk pelanggaran ketentuan perburuhan (ketenagakerjaan) yang dilakukan oleh pihak manapun.

(3). Lepaskan intervensi militer baik langsung maupun tidak langsung dalam hubungan industrial Pancasila.

(4). Perlu dilaksanakan standar-standar pengupahan buruh, keselamatan kerja, perlindungan terutama standar ILO yang telah diratifikasi Indonesia dan perlu segera dilakukan sosialisasi atas standar tersebut kepada kalangan buruh untuk menjamin adanya control dalam implementasi kerja.

(5). Pihak pemerintah perlu meningkatkan control atas pelaksanaan HIP di lapangan, menegakkan keadilan yang bersifat transparan dan melindungi berbagai hak-hak buruh yang telah diamanatkan dalam UUD 45 dan UU Perburuhan/ketenagakerjaan.

Koalisi Buruh dengan Kelas Menengah : SEBUAH CATATAN

Oleh: **RAZIF**

Koordinator & Peneliti YMB, Jakarta

Sebelum Indonesia merdeka, salah seorang pemikir bumiputera pernah menegaskan secara gambling : “Di dalam masa kemerdekaan belum tentu kaum buruh juga merdeka”. Prediksi ini masih relevan untuk masa Orde Baru, karena kini kaum buruh mengalami tantangan sangat berat; bagaimana membentuk organisasi buruh tanpa campur tangan pemerintah.

Kaum buruh pada masa Orde Baru merupakan generasi yang terputus dari zaman sebelumnya. Dalam arti, ia terputus dalam hal gagasan, praktek pengorganisasian serta “koalisi”nya dengan kelas menengah pada zaman Orde Lama atau Kolonial. Pada zaman Orde Lama dan colonial kaum buruh dapat melakukan pengorganisasian, tawar menawar atau pemogokan sendiri. Dalam melakukan itu mereka bekerjasama dengan actor atau kelas lainnya. Sumbangan kelas menengah atau actor yang berkoalisi dengan kaum buruh adalah; mengembangkan ide tentang organisasi demokratis; menerbitkan dan menyebarkan berbagai bahan bacaan dan; mendirikan berbagai lembaga pendidikan bagi kaum buruh. Peran berbagai institusi pendidikan itu merupakan cikal bakal pusat penelitian perburuhan yang dikelola oleh kaum buruh sendiri.

Terutama pada decade 1970-an, praktis, kaum buruh merupakan pejuang yang kesepian. Mereka berjuang sendiri dalam merubah nasibnya. Keadaan ini dimungkinkan karena situasi yang tidak menentu yakni, di satu pihak pemerintah Orde Baru sedang giat menarik investasi asing, sementara di pihak lain kelas menengah – mayoritas diwakili golongan terpelajar-menyibukkan diri dengan isu korupsi, moral pejabat atau menggugat keabsahan perlunya modal asing untuk “pembangunan”. Di sini kelas menengah mengabaikan kaum buruh sebagai sekutunya dalam mengkampanyekan isu korupsi atau anti modal asing untuk “pembangunan”. Kecuali itu decade 70-an juga ditandai oleh pertama, aplikasi strategi industry substitusi impor yang menitikberatkan pada

pembangunan industry dasar dan berat seperti baja, semen, tambang dan kimia dasar yang membutuhkan modal besar dan tenaga kerja terampil. Kedua, pada 1974 ada consensus nasional berupa pembentukan system tripartite, atau yang dikenal sebagai Hubungan Industrial Pancasila (HIP). Konstitusi HIP pada kenyataannya membatasi ruang gerak buruh untuk melakukan tawar menawar secara kolektif dengan pengusaha. Karena dalam konstruksi hubungan industrial yang baru ini, tawar menawar itu harus diperantai Departemen Tenaga Kerja.

Momentum perubahan strategi industrialisasi dari industry substitusi impor (ISI) ke industry orientasi ekspor (IOE), pada awal decade 80-an, diikuti oelhmeningkatnya kegiatan kelas menengah dalam hal pengorganisasian (pendampingan), pendidikan dan pembelaan hak-hak buruh. Seperti diketahui dtrategi IOE ini sangat mengandalkan keunggulan teknologi padat karya dan buruh tidak terampil. Pada saat yang sama, terjadi depolitisasi kampus. Kaitan sebab akibat ini tidak bias dilihat sebagai hubungan mekanistik, namun mempunyai proses yang cukup panjang.

Sejauh ini keterlibatan kelas menengah dalam pendampingan kaum buruh dimulai dengan cara; mendiskusikan berbagai teori pembangunan tentang Dunia Ketiga; membahas strategi industrialisasi dan bantuan luar negeri. Kebijakan industrialisasi dan bantuan luar negeri di dunia ketiga sering kali berbenturan dengan kepentingan kelas buruh. Diluar itu didapati juga aktivis yang sudah bergerek melakukan kegiatan advokasi buruh serta berbagai upaya meningkatkan kesejahteraan buruh melalui bermacam program peningkatan pendapatan (income generating).

Ada banyak contoh kegiatan pendampingan dan pembelaan buruh yang dilakukan aktivis. Kasus pemukulan buruh yang dilakukan oleh salah seorang personalia PT Garuda Indawa -memproduksi sepatu merk Eagle- mengundang terjadinya pemogokan selama beberapa hari. Kasus lain, terjadinya pemogokan buruh Teh Sosro. Mereka mogok karena pemimpin pemogokan dipecat oleh perusahaan. Dalam kedua kasus itu para aktivis segera turun tangan melakukan pembelaan hak-hak buruh. Kejadian ini memancing perdebatan tentang hak mogok antara Menaker Sudomo dengan ketua SPSI Imam Soedarwo. Demikian halnya dengan gejala buruh berupah rendah, para aktivis coba menangani dengan cara meningkatkan pendapatan mereka melalui program kursus menjahit atau membuka warung-warung untuk memenuhi kebutuhan buruh.

Juga ada diantaranya, kelompok pendamping buruh yang menggunakan seperti pendekatan *participatory action research* (PAR). Dalam pendekatan in buruh diasumsikan belum bias merumuskan dan menyusun kerangka berpikir secara sistematis mengenai persoalan dan dinamika lingkungan kerja mereka sehari-hari. Dari sini dikembangkan gagasan bahwa kepada mereka perlu diberikan pendidikan menulis. Lalu karya tulis mereka diterbitkan dalam satu bulletin atau majalah.

Dari tiga jenis kegiatan pendampingan buruh itu, secara jujur, sebenarnya belum terbentuk suatu 'koalisi' antara buruh dan kelas menengah. Arahnya

masih pada *contoh* kelas menengah kepada kaum buruh yang bernasib sengsara dan miskin. Hasil interaksi ini yang tadinya dirancang untuk mendinamiskan gerakan buruh adalah sebuah *philantropis*, atau perasaan kasih sayang. Dalam situasi seperti itu kaum buruh memandang kelas menengah atau mahasiswa sebagai '*dewa penolong*'. Gejala ini jelas terlihat, ketika para pendamping dan pembela hak-hak buruh itu (aktivis), akhirnya merekrut buruh yang terkena kasus sebagai *social worker* (pekerja social), dan mereka tidak dikembalikan ke komunitasnya.

Demikian pula aktivis yang membuka warung-warung usaha atau kursus menjahit mengalami disorientasi, karena kaum buruh tidak menguasai manajemen pemasaran. Selain itu, buruh-buruh itu segan kembali bekerja di pabrik, karena mereka lebih senang bekerja di rumah mengandalkan keterampilan menjahit. Ketika tingkat kehidupan mereka bertambah baik, tumbuh perasaan bahwa dirinya kini sebagai kelas menengah. Ini berarti program-program yang dikembangkan telah mencabut buruh dari akar kelasnya. Sementara itu aktivis yang memberikan pendidikan menulis, mendapati bahwa karya tulis buruh merupakan refleksi penderitaan mereka atas buruknyakondidi dan hubungan industrial yang berlaku.

Tidak terbentuk arah atau belum terjadinya dinamika gerakan buruh pada decade 1980-an dikarenakan adanya perbedaan kepentingan antara kelas menengah dan buruh. Kelas menengah mempunyai kepentingan ekonomi dan politik, sedangkan kelas buruh mempunyai kepentingan ekonomi. Kepentingan ekonomi kelas menengah dengan kepentingan ekonomi kelas buruh sangat berbeda. Kebanyakan kelas menengah yang mengorganisir buruh berasal dari mahasiswa yang latar belakang ekonomi keluarganya morat-marit. Kebutuhan dan untuk pendampingan dipenuhi dengan cara mengumpulkannya dari para donator. Sedangkan kepentingan politik mereka mengikuti logika kepentingan ekonomi, yakni buruh binaannya harus terikat mengikuti pola-pola yang mereka inginkan, seperti telah disebutkan di muka.

Dengan pola seperti itu kaum buruh mengikuti gaya berpikir kelas menengah. Yang kemudian terjadi adalah eksklusivitas pendampingan buruh dan kelas buruh tidak dipandang sebagai kekuatan politik. Pola semacam ini berlangsung sampai akhir decade 1980-an. Terlepas dari eksklusivitas kelompok-kelompok pendamping buruh, namun harus dicatat bahwa mereka juga memberikan sumbangan yang berarti, yakni menumbuhkan keberanian buruh untuk berhadapan langsung dengan aparat Depnaker, dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi. Meskipun untuk itu mereka masih harus didampingi.

Pada akhir decade 1980-an sampai awal decade 1990-an terjadi berbagai perubahan hubungan kerja dan kondisi kerja pada industry manufaktur, yakni setelah berkembangnya industry sub-kontraktor adalah industry pelimpahan pesanan. Contoh, PT. Great River, perusahaan garmen, mendapatkan lisensi dari Triumph, lalu disub-kontrakkan lagi ke perusahaan *Honey Lady*, namun lisensinya tetap dipegang oleh *Great River*. Bila order dari *Honey Lady* terus menurun maka kontraknya akan dialih ke pabrik lain atau perusahaan garmen luar negeri. Situasi semacam ini memerlukan perubahan strategi

pendampingan buruh; bagaimana mendinamiskan gerakan buruh dalam ruang yang terbatas. Bagaimana masalah ini dipecahkan dan format koalisi macam apa yang diperlukan, akan dibahas di bawah.

Dalam konteks ekonomi politik sekarang, masalah utama gerakan buruh adalah aspek pengorganisasian. Strategi aliansi antara buruh dengan kelas menengah yang akan bermuara pada persoalan pendampingan adalah bagaimana meningkatkan dan memaksimalkan upaya pengorganisasian. Berbicara tentang proses pengorganisasian, entah itu training, diskusi, dan lain-lain yang sejenis, maka esensinya adalah membahas soal "pendidikan".

Pendidikan bagi buruh merupakan kebutuhan mutlak dalam proses menuju kebebasan berserikat. Sekarang ini kebebasan berserikat sedang gencar diperjuangkan. Absennya proses pendidikan yang kontinyu dan sistematis akan membuat gerakan buruh bersifat spontan yang terlepas dari kerangka perjuangan rakyat menuju demokrasi. Di sini buruh merupakan satu kesatuan aliansi bersama dengan kelas lain, yang sama tertindas.

Pendidikan buruh berarti pula menyiapkan suatu kerangka yang kokoh bagi banyak serikat buruh alternatif yang akan bermunculan. Yang terjadi selama ini, serikat buruh alternatif yang sudah seperti SBM-SK dan SBSI mengabaikan proses pendidikan yang sistematis dan kontinyu. Akibatnya mereka begitu mudah diintervensi oleh kekuatan-kekuatan reaksioner dan menjadi lemah.

Berbagai pengalaman telah menunjukkan kelemahan dan kekuatan kita masing-masing. Setiap lembaga pendamping buruh memiliki kekurangan dan kelebihan. Oleh karena itu, untuk suatu langkah progresif kita perlu menyatukan berbagai kelebihan dan kekuatan itu serta mengkaji bersama, apa kelemahan dan kekurangan kita dalam melakukan proses pendidikan untuk buruh.

Namun dari semua itu kita masih merasakan banyak kekurangan, dan belum mencapai hasil maksimal. Satu hal yang bisa kita catat; saat ini kita belum mensistematisasikan tahapan pendidikan yang mestidilalui buruh, serta belum punya kurikulum baku untuk pendidikan buruh. Kedua hal itu sangat penting, karena nantinya dengan mudah kita bisa melakukan evaluasi terhadap proses pendidikan buruh. Selain itu instrumen pendidikan, seperti diskusi, seminar, training, bulletin dan majalah, yang telah kita kembangkan fungsinya belum maksimal.

Dalam hal publikasi karya tulis buruh, baik dalam bentuk majalah atau bulletin, selain ada keragaman tema kita juga merasakan tidak adanya kaitan yang jelas diantara tema-tema itu. Akibatnya arus informasi dan pengetahuan yang diperoleh buruh beragam; berbeda dari satu tempat ke tempat lain. Sungguhpun, taruhlah, lembaga itu meluaskan jangkauan distribusi penerbitannya ke daerah lain, akan tetapi langkah ini, tampaknya, masih belum maksimal dan belum bias memecahkan kendala; kesenjangan antara informasi yang disampaikan dan pengetahuan buruh.

Hal ini mungkin dapat dipecahkan bila ada suatu penerbitan tentang buruh yang berlingkup nasional. Namun karena kemampuan kita masih terbatas, tampaknya, yang paling mungkin kita lakukan adalah coba berusaha memaksimalkan publikasi yang ada supaya lebih terpadu.

Proses pendidikan buruh merupakan suatu proses penyadaran. Di sini buruh mendapat penjelasan dan analisis tentang struktur masyarakat. Dengan demikian mereka bias menyadari posisi perjuangan mereka dalam kerangka dan konteks lebih luas, yakni perjuangan masyarakat Indonesia menuju demokrasi. Dalam berbagai diskusi perburuhan sering ada argument; “buruh harus mandiri, tidak perlu membebek pada LSM, mereka harus bisa berdiri sendiri, dst. Kelihatannya argument ini sangat progresif, seolah-olah akan mendorong terbentuknya suatu serikat buruh yang mandiri dan *genuine* (sejati). Dari mana argument ini?

Sejarah gerakan demokrasi di Indonesia menunjukkan bahwa banyak LSM atau lembaga pendidikan buruh didirikan oleh aktivis-aktivis mahasiswa. Bila kita mengakui perlunya suatu aliansi antara kelas menengah dan buruh, agaknya argument ini harus dicurigai sebagai upaya akan memisahkan kerangka aliansi tersebut. Melalui pemisahan kerangka aliansi tersebut, gerakan buruh akan diarahkanpada gerakan “trade union-ism” (serikat-buruhisme).

Supaya suatu organisasi buruh bisa independen (mandiri) bukan berarti kita harus mengeliminasi aliannya dengan kelas menengah. Pekerjaan rumah yang harus kita diskusikan adalah ; sejauh mana peran yang bias dimainkan oleh LSM dan lembaga-lembaga bentukan para aktivis; apa itu organisasi buruh; bagaimana hubungan lembaga-lembaga itu dengan organisasi buruh; dan apa yang ingin dicapai oleh keduanya dengan konstruksi hubungan itu.

Kebutuhan untuk membentuk jaringan pendidikan buruh yang terjadi dan berlangsung di Jawa, namun kita belum menyinggung soal itu dalam konteks luar Jawa. Pemogokan buruh di Medan, pada tahun 1995, merupakan fenomena pertama pada zaman Orde Baru. Bagaimana proses pemogokan itu dan apa dampaknya masih luput dari perhatian kita. Yang kita tahu, informasi adanya pemogokan itu telah mendorong semangat buruh-buruh di kota lain.

Gerak Modal dan Tenaga Kerja

Oleh: SURYADI A. RADJAB

Anggota Free School for social Analysis, Bandung

Modal dan tenaga kerja bukanlah dua hal yang terpisah di dalam hubungan-hubungan social ekonomi. Modal memerlukan tenaga kerja, dan begitu juga sebaliknya. Secara timbal balik, keduanya mengharuskan hidupnya satu sama lain, serta melahirkan satu sama lain. Karena keduanya lahi, tumbuh dan berkembang bersama-sama.

Modal tidak dapat berkembang biak -- peranakpinakkan dirinya -- tanpa mempekerjakan sejumlah tenaga pekerja untuk menghasilkan modal yang baru. Begitu juga sebaliknya, tenaga kerja tidak akan dilahirkan sebagai buruh kalau modal tidak mentransformasikannya ke dalam hubungan kerja upahan (*wage labour relation*). Dengan demikian, pembiakan modal (*accumulation of capital*) dan kerja upahan – satu sama lain – saling membutuhkan.

Modal secara terurai disebut juga peralatn produksi (*means of production*) yang mencakup mesin-mesin produksi, bahan mentah dan baku (*raw material*), bangunan dan sarana penunjang perusahaan, serta uang (*money*) untuk membeli tenaga kerja (*labour power*). Uang sebagai bagian dari modal ini dipertukarkan dengan sejumlah tenaga kerja. Ini berarti tenaga kerja telah diubah menjadi komoditas (*commodity*).

Dalam proses penenman modal, pertama-tama harus dimulai dengan tersedianya modal uang. Dengan pengandaian ini kita dapat gambarkan bagaimana rumus modal berfungsi berikut ini.

LP	LP = tenaga kerja (<i>labour power</i>)
$M \rightarrow C = P \rightarrow C' \rightarrow M'$	MP = peralatan produksi (<i>means of production</i>)
MP. Is1Keterangan:	P = hasil proses produksi (<i>product</i>)
M = uang (<i>money</i>)	C' = komoditas baru ($C' > C$)
C = komoditas (<i>commodity</i>)	M' = uang baru ($M' > M$) ¹

Berfungsinya sirkuit modal itu terlihat bukan saja pada peralatan produksi, tapi juga tenaga kerja yang telah ditransformasikan menjadi komoditas

¹ Mesin sejarah kapitalisme bersumber pada akumulasi modal dan system upah. Lihat Immanuel Wallerstein, *Historical Capitalism* (London: Verso, 1987)

merupakan syarat utama bagi berfungsinya mesin akumulasi modal dalam corak produksi kapitalis (*capitalist mode of production*).

Mereka yang menjual tenaga kerja lazim disebut pekerja upahan atau buruh. Sedangkan yang membeli tenaga kerja disebut pengusaha atau pemilik modal. Dengan pemisahan ini, pekerja upahan tidak memiliki peralatan produksi. Satu-satunya milik buruh hanyalah tenaga kerja. Untuk dapat bertahan dan mengembangkan hidupnya, maka buruh terpaksa harus menjual tenaga kerjanya kepada pengusaha. Para pemodal memang memiliki modal, tapi mereka tidak dapat menghasilkan modal yang baru tanpa dihidupi oleh tenaga kerja. Dan memang buruh terpaksa harus mengabdikan kepada pemodal dengan satu tujuan: menghasilkan modal yang lebih besar.

Kemunculan perekonomian kapitalis sebagai kekuatan sejarah dunia telah menampilkan gerak atau mobilitas modal dan tenaga kerja bukan saja merambah di dalam negeri, tapi juga menembus batas-batas negeri dan berpindah ke mana-mana. Gerak modal dan tenaga kerja dapat dibahas lebih lanjut di sini.

Gerak Modal

Perekonomian di Indonesia sudah berkembang di bawah gerak dan logika modal sejak akhir abad ke-19. Sesudah berakhirnya program Tanam Paksa, modal-modal swasta Belanda tumbuh menjadi kekuatan ekonomi yang dominan. Gerak modal ini berkembang di sector perkebunan dan sedikit di sector industry manufaktur. Selain itu tumbuh juga modal-modal swasta dari kalangan etnis Cina maupun pribumi-islam. Kemunculan modal-modal ini telah membentuk struktur modal swasta di Indonesia masa colonial.¹⁾

Dalam operasi modal, selain membutuhkan sejumlah tenaga kerja yang mengoprasikannya, juga ditunjang oleh kekuatan-kekuatan produktif (*productive forces*) lainnya, yakni pengembangan mesin-mesin produksi. Dengan operasi modal, sumber-sumber alam maupun sumber daya manusia dieksploitasi. Adanya proses semacam ini memungkinkan modal berkembang biak dan meluaskan wilayah operasinya, tidak hanya di kota-kota tapi juga merambah ke desa-desa.

Kekuasaan atas modal merupakan kekuasaan yang dominan. Kekuasaan inilah yang membentuk sejarah ekonomi, politik dan kebudayaan masyarakat dan mencetaknya menurut kepentingannya. Lewat pengoprasian modal, kota-kota dan jalan raya dibangun, desa-desa dirambah, hutan-hutan ditebang dan perut-perut bumi digali, serta sebarisan pekerja upahan dikerahkan, tentu saja untuk kepentingan menghidupkan dan mengembangkan perusahaan-perusahaan maupun aparat-aparat Negara (*state apparatuses*) yang menunjang proses beropersinya modal.

¹) Lihat Richard Robinson, "Toward a Class Analysis of Indonesian Military Bureaucratic State", *Indonesia*

Tumbuhnya modal Belanda di Indonesia masa colonial menunjukkan bagaimana modal telah melampaui batas negeri untuk menggarap dan mengeksploitasi sumber alam dan manusia di sini. Perkembangan semacam ini tidak semata-mata dibangun atas dasar kehadiran modal secara fisik di wilayah-wilayah tertentu yang jauh dari negeri asalnya, melainkan juga oleh sebuah ideology kebebasan ekonomi atau berdagang.

Apa yang dikenal dengan GATT (*General Agreement on Tariffs*) yang diselesaikan melalui Putaran Uruguay, kemudian diganti dengan WTO (World Trade Organization) yang bermarkas di Geneva (Swiss), serta adanya rencana pembentukan wilayah-wilayah perdagangan bebas seperti AFTA (wilayah Asean), NAFTA (Amerika Utara), LAFTA (Amerika Latin), dan pembentukan kerjasama ekonomi APEC yang menghasilkan kesepakatan liberalisasi perdagangan dan investasi, menjelaskan bahwa ideology kebebasan ekonomi telah mendorong terbukanya dunia ini dibawah kekuasaan akumulasi modal.¹⁾

Sejak 1967 Orde Baru mengeluarkan Undang-undang Penanaman Modal Asing (PMA). Artinya Indonesia menjadi lebih terbuka bagi modal asing. Sejak itu modal-modal AS, Jepang, Inggris, dan Jerman yang kemudian disusul Hongkong, Singapura, Taiwan dan Korea Selatan masuk mengoprasikan modal mereka di Indonesia. Modal asing inilah yang telah merajai perekonomian nasional pada periode 1967-1973, karena mereka menguasai sampai 57 persen proyek investasi.²⁾

Pada akhir 1973 Indonesia ketiban rejeki “nomplok” dari ekspor minyak dan gas (migasi). Dengan menggunungnya pendapt migas, perekonomian digerakkan untuk menumbuhkan modal-modal ISI ditopang dengan proteksi tariff bea masuk yang sangat tinggi. Produk-produknya disebarakan hanya di pasar domestic, terutama pasaran Negara. Dengan *pertidollar* dan kebijakan proteksimaupun akses monopoli pasar, maka modal-modal ISI tumbuh menjadi raksasa baru di negerinya sendiri.

Ternyata *Oil boom* tidak bertahan lama. Tapi kebijakan proteksi maupun posisi-posisi monopoli tidak mudah dibongkar. Karena itu, modal asing kurang berminat masuk kembali ke Indonesia. Pemerintah tidak kehilangan akal, maka kebijakan buruh murah menjadi andalan bagi modal asing yang industrinya sudah using di negeri asalnya. Sejak itu mulai bermunculan relokasi pabrik dari Hongkong, Taiwan, Korea Selatan dan Singapura ke Indonesia. Sejumlah perusahaan asing baik TNC (transnational corporation) juga melancarkan pola-pola subkontrak ke sini.³⁾

Sedangkan pada pemodal besar domestic yang terlanjur dengan pola ppatronasi bisnis tidak berminat melakukan investasi besar jangka panjang, karena situasi politik ekonomi di Indonsia tidak pasti. Sudah tentu mereka -- setelah menggenjot pasar domestic dengan menetapkan harga barang secara sangat mahal—yang mempunyai kekuatan financial yang besar harus

¹⁾ Suryadi R. Radjab, “Perdagangan Bebas Sebagai Ideologi Ekonomi”, *Republika*, 3 April 1995.

²⁾ Richard Robinson, :Politik Restrukturisasi Ekonomi di Indonesia di Indonesia Pertengahan 1980-an”, *Tanah Air*, No. 4, September 1989.

³⁾ Lihat juga Alexander Irwan, *PatronisasiBisnis, Kelas dan Politik*, (Jakarta: SPES, 1994)

menginvestasikannya ke luar negeri (*capital flight*) seperti Cina, Vietnam dan Rusia, AS, Jerman atau Singapura. Terlihat bagaimana modal tumbuh sebagai warga dunia, kendati terkadang membendung laju modal asing dengan sentiment nasionalisme.¹⁾

Berdasarkan pembahasan di muka, dapat ditangkap bahwa mobilitas modal dibatasi dua factor. Pertama, politik ekonomi suatu negeri dalam menjamin kepercayaan dunia usaha (*business confidence*) untuk jangka panjang. Hal ini belum terbentuk di Indonesia, sehingga tidak sedikit *capital flight*. Kedua, kompetisi di antara pemodal senantiasa menandai mobilitas modal. Sudah menjadi wataknya bahwa kapitalisme menghasilkan kontradiksi sesama pemodal. Bisnis mereka senantiasa terancam oleh para pesaingnya.

Mobilitas tenaga kerja

Munculnya modal-modal Belanda di masa colonial, juga membutuhkan tenaga Kerja Asal Belanda. Mereka umumnya menduduki posisi sebagai menajer, atau paling rendah di tingkat pengawas. Begitu juga dengan masuknya modal-modal AS, Jepang, Inggris dan Jerman. Bahkan sector manufaktur ringan yang dimasuki modal-modal Hongkong, Taiwan dan Korea Selatan pun mempekerjakan tenaga kerja dari negeri asalnya.

Modal yang beridentitas nasional, ternyata menggandeng tenaga kerja berdasarkan nasionalitasnya. Sama seperti modal, tenaga kerja juga dapat melintasi batas-batas negeri. Pemerintah sudah memperluas kesempatan ke luar negeri, yaitu kebijakan pengiriman TKW (tenaga kerja wanita) ke Timur Tengah, Hongkong serta TKI (tenaga kerja Indonesia) ke Malaysia, Singapura, dan Brunai Darussalam. Tahun lalu pemerintah telah menandatangani MOU (*Memorandum of Understanding*) dengan pemerintah Malaysia tentang pengiriman 1 juta TKI ke Malaysia. Memang Indonesia termasuk yang paling banyak mengeksport tenaga kerja.

Dengan harapan dapat bekerja di Malaysia, banyak terjadi penyebrangan illegal – menyalahi ketentuan emigrasi – orang Indonesia ke Malaysia. Pemerintah Malaysia menyebut mereka sebagai “pendatang haram”. Penyebrangan ini tidak saja dari perairan Riau, tapi juga lewat lintas perbatasan Kalimantan. Melintasnya pendudukan Kalimantan Barat yang berbatasan dengan Serawak (Malaysia Timur) merupakan contoh bagaimana mereka bermigrasi ke Serawak untuk bekerja di sana.²⁾

Kendati sama-sama mempunyai nilai tukar (*exchange value*) atau komoditas, tenaga kerja berada dengan modal. Tenaga kerja berada dalam darah dan daging manusia (pekerja), sedangkan modal di luar pekerja. Mobilitasnya tidak semata-mata fisik, tapi juga yang terpenting adalah bersifat social.

¹⁾ Lihar Suryadi A. Radjab, “Nasionalisme Pengusaha dan Investasi di Luar Negeri”. *Bisnis Indonesia*, 17 April 1993; juga “Iklim Investasi dan Penyerapan Tenaga Kerja”, *Republika*, 9 Juli 1993

²⁾ Lihat James Siagian, “Mobilitas Penduduk Lintas Perbatasan: Kasus Kalimantan Barat-Serawak”, *Prisma*, No. 1, Januari 1995.

Dalam mobilitasnya, tenaga kerja di dalam negeri dibatasi oleh beberapa factor berikut ini. Pertama, daya tampung pasar tenaga kerja. Besarnya pasar ini terbatas dalam hubungannya dengan pertumbuhan angkatan kerja (calon pekerja). Mereka dipaksa memperebutkan “ruang pasar” demi menjual tenaganya. Mereka berusaha memenuhinya lewat mengkonsumsi lebih banyak komoditas pendidikan. Ketiga, perkembangan distribusi pekerjaan di berbagai jenis yang tergantung pada skala dan teknik produksi serta metode organisasi kerja. Keempat, adanya pengembangan semacam “pemujaan hirarki” bagi pekerja, sehingga mereka menjadi haus status dan gelar pekerjaan yang lebih baik. Kelima, perkembangan organisasi pekerja atau serikat-serikat buruh sebagai saluran mobilitas mereka untuk menjalankan fungsi control dalam mengartikulasikan kepentingan mereka. ¹⁾

Namun persoalannya, strategi akumulasi modal di Indonesia masih sangat mengandalkan tenaga kerja yang murah. Hal ini tidak menopang ambisi menggarap industrialisasi yang berhasil. Mobilitas modal terbatas demimemanfaatkan upah rendah. ²⁾

Sebaliknya, perjuangan buruh di dalam dominasi dan hegemoni Negara, terlalu lemah, sehingga upah riil mereka anjlok. Dampaknya adalah imobilitas buruh dalam memperluas domestic. ³⁾

¹⁾ Jill Rubery, “Pasar Kerja Terstruktur , Organsasi Pekerja, dan Upah Rendah”, dalam Anthony Giddens dan David Helds (eds), *Perdebatan klasik dan Kontemporer mengenai Kelompok, Kekuasaan, dan Konflik*, (Jakarta: Rajawali,1978)

²⁾ Suryadi A. Radjab, “Relokasi dan Akumulasi”, *Kompas*, 23 Mei 1995.

³⁾ Suryadi A. Radjab, “Upah riil buruh anjlok, Produktivitas Nasional Melonjak”, *Bisnis Indonesia*, 15 Februari 1994

Pendekatan Konvensional dan Pendekatan Alternatif Dalam Penelitian Sosial

Oleh : IR. HETIFAH SJAIFUDIAN, MPP
Peneliti AKATIGA

Dari waktu ke waktu metodologi penelitian social senantiasa mengalami perkembangan. Perkembangan ini telah membelah metodologi riset ke dalam dua kutub; konvensional dan alternatif. Istilah “konvensional” biasanya digunakan untuk suatu kebiasaan atau sudah biasa digunakan. Padanan istilah yang sering digunakan untuk menunjukkan sifat konvensional yaitu “tradisional” atau “klasik”. Istilah konvensional pada penelitian social biasanya mengacu pada bentuk-bentuk penelitian ilmiah/akademis, penelitian kebijakan.

Dalam proses perkembangannya, metodologi penelitian konvensional mengalami berbagai perubahan. Namun pendekatan konvensional yang sudah mengalami perubahan di sana-sini belum tentu menjadi pendekatan alternative. Konsep alternative dalam penelitian social menawarkan suatu pilihan pendekatan baru, karena sama sekali berbeda dengan pendekatan yang biasanya digunakan, baik pada muatan ideologis, sikap dasar para penganut, dan juga tata cara penyelenggaraan. Ketika kita berbicara mengenai metodologi penelitian alternative, ada dua kata kunci yang membedakannya dengan pendekatan konvensional yaitu “aksi” dan “partisipasi”. Kedua kata ini melahirkan transformasi radikal dalam berbagai hal : tujuan dan orientasi penelitian, peran peneliti dan komunitas, serta hubungan peneliti dengan “subyek” penelitiannya.

Pandangan alternative dalam meningkatkan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan umat manusia dianggap sangat penting untuk menyusun strategi yang mengkaitkan antara penelitian dan aksi. Padahal dalam penelitian konvensional, tugas utama pada peneliti hanyalah menemukan fakta-fakta dasar dan kaitan-kaitannya satu sama lain. Kemudian menyerahkan pada orang lain bagaimana hasil penelitian itu akan dimanfaatkan. Walaupun para peneliti pada umumnya berpendapat bahwa pengetahuan yang baik adalah yang dapat diterapkan, namun dalam penelitian konvensional jarang sekali penelitian dan aksi dikaitkan langsung. Metode penelitian alternatif seperti riset asli (*Action Research*) muncul dalam upaya mendekatkan penelitian dengan aksi.

Selain “aksi”, “partisipasi” juga merupakan ciri dari pendekatan **alternatif**. Oleh sebab itu pendekatan alternatif sering juga disebut sebagai pendekatan

partisipatif. *Professional Expert model* merupakan model paling umum dari penelitian social terapan konvensional. Pada model ini klien meminta pada peneliti untuk mempelajari situasi dan masalah tertentu, menemukan fakta-fakta yang ada, menginterpretasikannya, dan kemudian merekomendasikan langkah-langkah aksi yang perlu dilakukan oleh para pengambil keputusan.

Peneliti, dalam metodologi konvensional adalah seorang profesional. Untuk itu dibutuhkan pengetahuan dan keterampilan khusus yang menjadikan tidak sembarang orang bias menjadi peneliti. Untuk mengatur tindakan para peneliti, ada kode etik profesi yang menetapkan apa yang harus dan apa yang tidak harus dilakukan oleh seorang peneliti. Sangat berbeda dengan model hubungan yang elitis pada penelitian konvensional, pada pendekatan alternatif sebagian dari mereka yang diteliti akan berpartisipasi secara aktif, bersama-sama dengan peneliti, sejak perancangan awal hingga presentasi akhir hasil penelitian termasuk mendiskusikan implikasi terhadap aksinya. Kesimpulan: bila dalam penelitian konvensional komunitas diperlakukan sebagai subyek yang pasif, maka dalam penelitian alternatif, mereka adalah elemen paling menentukan dalam keseluruhan proses penelitian.

Salah satu prinsip dasar metodologi konvensional adalah ia harus tunduk pada berbagai kaidah dan peraturan ketat yang dikembangkan oleh masyarakat ilmiah. Artinya dari awal sampai akhir proses, penelitian harus mengikuti cara-cara yang sudah ditentukan, yaitu prinsip memperoleh pengetahuan. Selain harus mengikuti kaidah ilmiah, metodologi konvensional sangat menekankan obyektivitas. Bias peneliti tidak boleh mempengaruhi proses penelitian. Jika terpengaruh maka itu akan mengurangi nilai penelitian. Walaupun ada berbagai varian penerapan metodologi konvensional, namun yang paling populer adalah metode penelitian survey. Metode ini biasanya menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data.

Rupanya penelitian konvensional yang menempatkan peneliti sebagai ahli berotoritas penuh untuk mengontrol seluruh proses penelitian dianggap tidak akan langsung mendukung terjadinya perubahan social dalam masyarakat, sebagai obyek penelitian. Bahkan biasanya penggunaan metodologi ini cenderung mempertahankan *status quo* tatanan masyarakat yang sudah ada. Ketidakpuasan lain terhadap fungsi metodologi konvensional adalah metodologi ini tidak membicarakan (dan tidak peduli) tentang; siapa pemanfaat dan siapa mendapat untung dari perkembangan ilmu pengetahuan (social) yang sedang dijalankan. Dengan kata lain metodologi ini bersifat bebas nilai. Mereka yang menguasai capital dengan mudah memberikan "pesanan" kepada peneliti profesional. Pada akhirnya merekalah yang menikmati manfaat dari penggunaan metodologi itu. Sementara masyarakat miskin tidak mendapatkan manfaat.

Metodologi penelitian alternatif berkembang sebagai reaksi dan koreksi terhadap berbagai kekurangan atau kelemahan metodologi konvensional. Diskusi mengenai metodologi alternatif, belakangan ini biasanya mengacu pada metode RRA (*Rapid Rural Appraisal*), yang mulai populer pada decade 1980-an. RRA muncul akibat ketidakpuasan; terhadap peranan para profesional yang sangat urban-bias, dan juga terhadap hasil penelitian melalui

penggunaan metode survey dengan kuesioner. Faktor lain yang juga penting, adalah adanya keinginan mencari metode penelitian yang lebih *cost-effective*. Namun demikian –seperti halnya penelitian konvensional- RRA masih bersifat ekstraktif. Peran orang /pihak luar (*outsider*) masih dominan. Pihak luarlah yang menentukan agenda, mencari data, mengorganisasikan, menganalisis serta menulis laporan. Mereka juga yang akan memiliki informasi yang diperoleh.

Evolusi dari metode RRA ini adalah metode RRA (*Participatory Rural Appraisal*) yang dengan sangat cepat tersebar mulai tahun 1990-an. Orientasi participatoris sangat kental pada pendekatan PRA. Sangat berbeda dengan RRA, dalam metode PRA pihak luar tidak lebih dari fasilitator dan konsultan. Kelompok yang miskin atau yang kurang diuntungkan dalam pendekatan ini aka memiliki control yang lebih besar dalam proses pengambilan keputusan yang akan mempengaruhi hidup mereka. Karena itulah, aspek pemberdayaan masyarakat menjadi sangat penting dalam pendekatan PRA. Sementara itu tujuan-tujuan yang pada pendekatan konvensional sangat penting –seperti menghasilkan laporan atau publikasi hasil penelitian-, dalam PRA justru bukan prioritas.

Mengapa orang memilih salah satu dari kedua metodologi? Walaupun pemahaman dan penguasaan metodologi alternative cenderung meningkat, namun masih banyak peneliti dan lembaga penelitian menghindari penggunaannya. Mereka terus bertahan menggunakan metodologi konvensional. Ada beberapa alasan mengapa mereka menggunakan metodologi konvensional:

Pertama, ini merupakan alasan paling sering dijumpai, yaitu mereka hanya menguasai metode konvensional. Kuliah metodologi penelitian di perguruan tinggi, dan juga berbagai buku metodologi penelitian, lebih banyak menguraikan metode konvensional. Kurangnya pengetahuan, keterampilan, pengalaman praktis dan pemahaman tentang metodologi itu sendiri – khususnya di tingkat pelaksana program- memang merupakan kendala utama ketika bermaksud menerapkan pendekatan alternative.

Kedua, metodologi konvensional dianggap sudah memadai dan menawarkan banyak alternative metode pengumpulan data/informasi. Ada berbagai varian dari metodologi ini –beberapa di antaranya bahkan dianggap mampu member peluang kepada masyarakat yang diteliti untuk berpartisipasi-, misalnya *Focus Group Discussion*. Sementara itu ada anggapan metodologi penelitian alternative belum mapan dan aplikasinya masih dalam tahap percobaan. Bukti keberhasilan aplikasi metode ini belum banyak.

Ketiga, metodologi konvensional dianggap kompromistis. Artinya, aplikasinya dapat disesuaikan dengan keterbatasan dana, waktu dan jadwal yang ketat. Ketiga masalah ini biasa dihadapi oleh peneliti atau lembaga penelitian.

Keempat, penelitian yang dilaksanakan sekarang ini umumnya tidak menjamin atau bahkan tidak ada kaitannya dengan kegiatan tindak lanjut/program. Ini karena, seperti biasa, tujuan penelitian hanya untuk

memperoleh informasi sepihak. Dengan demikian metodologi konvensional dianggap sebagai pilihan tepat.

Kelima, terlalu banyak yang harus dirubah, terlalu banyak perhatian yang harus diberikan, dan yang paling penting terlalu banyak syarat yang harus dipenuhi oleh peneliti dalam bersikap dan berperilaku ketika melakukan penelitian. Dalam situasi kekurangan tenaga ahli – mereka yang dianggap ahli biasanya sangat sibuk dan mempunyai banyak tugas pada waktu yang bersamaan – sangat sulit bagi para profesional untuk berkomitmen secara penuh menggunakan metodologi alternatif.

Keenam, mereka tidak percaya bahwa metodologi alternative seperti PRA dapat menjamin ketepatan data dan ketajaman analisa. Aspek validasi data yang diperoleh melalui penggunaan metodologi alternative diragukan. Akibatnya banyak akademisi konvensional segan menggunakannya.

Sementara itu, meskipun masih secara parsial dan coba-coba, sejumlah peneliti dan lembaga penelitian telah mencoba menerapkan metode alternative. Ada beberapa alasan mengapa mereka menggunakan metodologi penelitian alternatif:

Pertama, Secara ideologis mereka tidak dapat menerima bentuk-bentuk pendekatan konvensional yang dianggapnya tidak etis. Kritik dari segi etika; peneliti akademis hanya meng-'obyek'-kan masyarakat demi kepentingannya sendiri.

Kedua, mereka beranggapan metodologi alternative lebih sesuai digunakan untuk kepentingan tertentu atau untuk memperoleh informasi tertentu. Dengan demikian mereka tidak "anti" metodologi konvensional. Persoalannya, hanya kapan suatu metodologi itu tepat atau tidak tepat digunakan untuk suatu situasi tertentu.

Ketiga, mereka merasa harus menggunakannya, karena untuk mengikuti "mode" yang sedang tren, supaya tidak ketinggalan zaman.

Berdasarkan berbagai pengalaman mereka yang telah mencoba menerapkan metodologi ini, serta analisis terhadap kelebihan maupun kekurangan masing-masing metodologi, maka dapat dikemukakan beberapa pegangan berikut ini :

Jangan gunakan metodologi alternative jika tujuan penelitian hanya untuk mengumpulkan data dan informasi, dan tidak ada niat sedikitpun untuk melakukan pemberdayaan masyarakat.

Jangan gunakan metodologi alternatif jika penelitian dilakukan oleh satu orang, misalnya untuk disertasi atau skripsi karena metodologi alternative adalah kegiatan yang dilakukan oleh tim, bukan satu orang.

Jangan gunakan metodologi alternative jika para pelaksana tidak memiliki pengertian dan pemahaman yang memadai mengenai prinsip-prinsip dasar metodologi alternatif. Penggunaan metodologi yang serampangan karena ketidaksiapan para pelaksananya justru akan berakibat sangat buruk bagi masyarakat.

Jangan gunakan metodologi alternatif bila waktu dan dana merupakan paket yang sangat terbatas. Jika paket waktu dan dana tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan, maka kegiatan akan dilakukan secara tergesa-gesa.

Jangan gunakan metodologi alternatif jika tidak ada rencana untuk melakukan tindak lanjut. Jika tidak, maka hal itu akan mengecewakan masyarakat. Dan kegiatan yang dilakukan bias dikatakan merupakan penyalahgunaan metode partisipatif.

Jangan gunakan metodologi alternative untuk kegiatan skala sangat luas. Penerapan dalam skala kecil dan terbatas akan memberikan hasil lebih baik. Paling tidak untuk sementara waktu ketika kita masih dalam proses belajar sehingga resiko besar dapat dihindari.

	Gunakan Metodologi konvensional	Gunakan metodologi alternative (PRA)
Tujuan utama	Ekstraksi informasi dan menghasilkan publikasi	Memberdayakan masyarakat
Peneliti	Individu	Tim
Pelaksana	Hanya terbiasa dengan metodologi konvensional	Menghayati dan mendalami prinsip-prinsip PRA
Waktu	Jadwal dan target sangat ketat	Disesuaikan dengan kebutuhan lapangan
Dana	Sangat terbatas	Memadai
Tindak lanjut	Tidak ada	Ada
Skala kegiatan	Luas	Sempit

Referensi

Chambers, Robert, *Rural Appraisal: Rapid Relaxed and Participatory*, Institute of Development Studies, 1992.

Fernandes, Walter & Rajesh Tandon, *Riset Partisipatoris Riset Pembebasan*, PT Gramedia, Jakarta, 1993.

Pusat Studi Wanita UNPAD dan Yayasan Mandiri, *Penerapan Metoda Participatory Rural Appraisal dengan Perspektif Jender dalam Proyek Pembangunan*, Bandung, 1994.

Sawit M. Husen, Sulaiman Awzia, Sudi Mardianto, Suyanto, *Metodologi Participatory Rural Appraisal (PRA) dalam Alternatif Sistem Tebas Bakar*, ASB Indonesia & Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, 1995.

Studio Driya Media, *Berbuat Bersama Berperan Bersama Pengkajian dan Perencanaan Program Bersama Masyarakat*, 1994.

Sweeting, Patrick, Mary Ann Kingsley, Kamala Candrakirana, *Final Report of The Evaluation Mission, Support to The Government's Inpres Desa Tertinggal Poverty Alleviation Programme INS/94/002/B/01/99*, 1995.

Theis Joachim and Heather Grady M, *Participatory Rapid Appraisal for Community Development*, IIED, 1991.

Whyte, William Foote, *Participatory Action Research*, SAGE Publications, 1991.

Women and The Labour Market

Oleh: TERESA REES

(Routledge, London 1992) xiii + 219 hal

Buku ini ingin menjawab pertanyaan bagaimana ideologi keluarga, keterbatasan material dan mekanisme pengicilan mempengaruhi 1) kebijakan pendidikan dan latihan bagi perempuan dan, 2) dinamika keterlibatan perempuan dalam pasar tenaga kerja. Ideologi keluarga menjelaskan peranan perempuan dan juga interaksi perempuan dengan laki-laki di dalam keluarga. Ideologi ini bias menjelaskan berbagai kemungkinan bagi perempuan untuk masuk ke ruang public dan bagaimana ia diperlakukan di ruang publik itu. Keterbatasan material mengacu pada persoalan yang dihadapi perempuan sehari-hari sehingga membatasi kemungkinan dan pilihan-pilihan mereka untuk memasuki pasar kerja. Relasi kuasa asimetris menyebabkan perempuan menghadapi keterbatasan alternatif baik dalam keluarga maupun dalam proses akumulasi capital (hal.9). Sementara mekanisme pengicilan, secara specific mengacu pada proses dan mekanisme yang terjadi di tempat kerja, sehingga kita mendapati adanya gejala dimana perempuan dijauhkan dari akses terhadap jenis pekerjaan tertentu dan pasar tenaga kerja secara umum.

Studi yang dilakukan penulis di beberapa Negara seperti Inggris, Jerman dan Australia menunjukkan pertama, ideology keluarga sangat jelas mempengaruhi permintaan dan penawaran tenaga kerja. Ideologi ini mempengaruhi struktur pilihan individu proses perekrutan dan strategi alokasi sumberdaya. Yang terjadi adalah berkembangnya stereotip; misalnya karena laki-laki dianggap sebagai pencari nafkah utama maka sudah selayaknya ia mendapatkan jenis pekerjaan yang prospektif, buat perempuan sebaliknya. Perempuan dianggap cocok untuk bekerja paruh waktu, bagi laki-laki penuh waktu.

Kedua, terbatasnya pilihan bagi perempuan untuk masuk pasar tenaga kerja dibatasi oleh keterbatasan material mereka. Untuk intensif terlibat dalam sector public mereka harus menghadapi berbagai kendala, dua diantaranya organisasi kerja dan komitmen kepada sector domestic. Organisasi kerja dan relasi patriarkhi di tempat kerja menghambat partisipasi perempuan dalam pasar kerja. Demikian juga dengan komitmen pada sektor publik.

Ketiga, rendahnya populasi pekerja perempuan yang menempati posisi puncak atau menempati jenis-jenis pekerjaan strategis baik di sector pemerintahan maupun swasta menunjukkan bahwa mereka telah dikucilkan secara sistematis oleh pekerja laki-laki. Itu juga dijumpai dalam serikat pekerja dimana perempuan hanya menempati posisi minor. Anggapan bahwa perempuan kutang cakap dalam manajerial, jelas akan menghambat karir mereka . Rendahnya akses kepada sumberdaya dan ketidakmampuan menjangkau jaringan bisnis meunjukkan bekerjanya mekanisme pengucilan ini.

Kaum feminis percaya betul pendidikan merupakan instrument ampuh untuk emansipasi dan pembebasan perempuan. Maka muncul berbagai upaya untuk memperluas peluang sekolah bagi kelompok perempuan. Anehnya, meskipun upaya itu sudah cukup berhasil, stereotif jenis pekerjaan dan pendidikan berdasarkan gender masih sangat kuat. Sekali waktu ada percobaan; suatu pendidikan dan latihan dirancang sedemikian rupa sehingga perempuan 'digiring' memilih jenis pendidikan dan pekerjaan laki-laki. Tetapi mereka tetap saja memasuki sector-sektor yang selama ini diklaim sebagai sector perempuan. Ini terjadi karena dalam proses memilih pendidikan dan profesi, sebenarnya sudah dikonstruksikan secara social. Pilihan mereka memilih jenis pendidikan dan pekerjaan tertentu, bukan semata-mata karena ada peluang yang cukup terbuka, tapi karena sudah dikonstruksikan (hal. 38).

Buku ini juga menjelaskan pengaruh system patriarki dalam pembentukan pasar tenaga kerja. Ada dua system terpisah namun saling berinteraksi, yaitu relasi gender dan mode produksi. Relasi gender dan mode produksi yang berlaku sekarang ini adalah patriarki dan kapitalisme. Kombinasi kedua system ini melahirkan penindasan perempuan.

Disinilah kita berkenalan dengan *dual system teory*. Teori ini menganalisis artikulasi antara patriarki dan kapitalisme. Artikulasi kedua elemen ini diinterpretasikan secara berbeda; Eisentein (1979) melihat patriarki dan kapitalisme sebagai dua system terpisah namun menyatu; Coeburn (1983) melihatnya sebagai dua hal yang terpisah namun terus saling berinteraksi; Hartmann (1978) mengidentifikasinya sebagai dua system yang mempunyai kepentingan identik. (hal 32).

Meskipun teori ini belum bias menjelaskan seberapa jauh reaksi antara kelas dan gender, namun pemahaman tentang teori ini cukup penting karena bias memahami fenomena segregasi kerja yang sekarang ini terjadi di mana-mana. Kehadiran buku ini cukup relevan untuk 'membaca' situasi perempuan dan pasar kerja di tanah air.

DEDI HARYADI

Perpustakaan AKATIGA : Selayang Pandang

Oleh : **MARLIZA**

Keberadaan perpustakaan, sebagai pusat informasi dan dokumentasi, sangat penting bagi sebuah lembaga penelitian. Tidak terkecuali bagi AKATIGA, yang memposisikan diri sebagai lembaga penelitian social independen.

Karena itu sejak awal AKATIGA punya komitmen, selain terlibat intensif dalam kegiatan penelitian, juga berupaya mengembangkan perpustakaan sebaik mungkin. Bagaimanapun ada kaitan erat antara kegiatan penelitian dan pengembangan perpustakaan. Bagi AKATIGA, unit perpustakaan merupakan bagian integral dan sangat vital dalam menunjang kegiatan penelitian. Menyadari peranannya sangat penting, maka perpustakaan itu dikelola secara baik. Hal itu ditempuh melalui penyediaan anggaran yang memadai, manajemen yang baik dan pengangkatan personalia yang cakap.

Selain dirancang untuk memenuhi kebutuhan sendiri, perpustakaan AKATIGA juga dipersiapkan untuk melayani masyarakat umum. Dengan format pelayanan seperti itu, diharapkan fungsi perpustakaan AKATIGA bisa optimal.

Sampai saat ini koleksi perpustakaan AKATIGA mencakup 2.500 judul buku dan 800 judul artikel. Setiap bulan selalu ada buku dan artikel baru. Selain mengoleksi buku dan artikel, perpustakaan AKATIGA juga berlangganan beberapa jurnal, dalam dan luar negeri, majalah, bulletin, newsletter dll. Koleksi itu diperoleh melalui pembelian, pemberian, atau hasil tukar menukar dengan lembaga lain. Dari segi isi, sebagian besar koleksi perpustakaan AKATIGA menyangkut kepustakaan tentang pertanian, perburuhan, usaha kecil dan gender.

Pemilihan koleksi ini, bagaimanapun dipenuhi oleh perhatian AKATIGA, yang memang kajian utamanya di sekitar masalah itu. Secara langsung, kebijakan pengkhususan koleksi ini akan membangun citra khusus sebuah perpustakaan. Jadi dengan demikian, kalau orang ingin mencari literature tentang pertanian, perburuhan, usaha kecil atau gender, ia tidak akan ke mana-mana tapi bias datang ke perpustakaan AKATIGA. Untuk ke depan memang perpustakaan AKATIGA diancangkan untuk bisa seperti itu.

Penentuan dan pemilihan koleksi, terutama buku, sering melibatkan staf peneliti. Cara ini ditempuh, selain akan meringankan beban kerja pustakawan, juga lebih dirasakan pada pengetahuan dan kebutuhan peneliti terhadap suatu jenis literature.

Sistem Layanan

Untuk memudahkan layanan, saat ini kami mengembangkan tiga cara penelusuran informasi, yaitu;

1. Micro CDS-ISIS versi 2.3
2. Kartu Katalog
3. Daftar Bibliografi Terseleksi

Micro CDS-ISIS versi 2.3 merupakan suatu system *komputerisasi* yang dirancang khusus untuk menyimpan data berbagai koleksi. Perangkat lunak ini sangat membantu pustakawan dalam mensistematisasikan koleksi, sehingga dengan demikian mudah diakses kembali ke para pengguna. Setiap pengguna diberi kesempatan untuk menelusuri informasi melalui ISIS.

Kartu Katalog dan Daftar Bibliografi Terseleksi merupakan bentuk cetakan yang digunakan, terutama penggunaan umum, untuk menelusuri informasi. Kedua alat ini bisa dijadikan untuk mengukur kekayaan sebuah perpustakaan. Bagi pengguna umum, saat ini perpustakaan AKATIGA menerapkan kebijakan *close access service* atau system layanan tertutup. Pertimbangannya adalah koleksi itu hanya terdiri dari satu kopi. Akan terjadi hambatan jika, koleksi itu dipinjam, sementara pada saat yang sama juga dibutuhkan oleh pengguna lain. Pengguna bisa membaca di tempat yang sudah disediakan atau memfotokopi informasi yang dibutuhkan.

Untuk melayani kebutuhan pengguna umum, tersedia jadwal sebagai berikut:

- **Senin dan Rabu** : pukul 09.00 – 12.00 ; 13.00 – 15.00
- **Jumat** : pukul 09.00 – 11.00 ; 14.00 – 16.00

Dalam menunjang aktivitas perpustakaan dan mengikuti dinamika perkembangan teknologi informasi, kini perpustakaan AKATIGA telah memanfaatkan sarana Elektronik Mail (E-mail). Selain sebagai alat komunikasi antar peneliti, Email juga dimanfaatkan oleh unit perpustakaan sebagai alat untuk mengumpulkan dan menyebarkan informasi. AKATIGA bergabung dengan jaringan Nusa.Net inilah yang menghubungkan akses anggota-anggotanya ke internet. Fasilitas ini juga memungkinkan pustakawan menghubungi penerbit di luar negeri sesegera mungkin. Terlebih sekarang ini sudah banyak penerbit yang mencantumkan E-mail address mereka.

Kinerja sebuah perusahaan juga dipengaruhi oleh factor adanya kerjasama antar lembaga Seringkali kapasitas perpustakaan terbatas, sementara kebutuhan untuk mendapatkan koleksi dan memperbaiki pelayanan terus meningkat. Dalam kondisi seperti itulah kami merasa perlu mengembangkan kerja sama dengan lembaga lain. Saat ini memang kami sedang berusaha menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga dan pusat informasi, di dalam dan luar negeri.

Menimba Pengetahuan

Dalam rangka memperluas dan memperdalam wawasan secara teratur, AKATIGA mengirimkan staffnya secara bergantian untuk melakukan proses belajar melalui forum-forum seminar dan diskusi mengenai topik yang relevan dengan bidang kajiannya. Tiga bulan terakhir ini beberapa forum diskusi dan seminar diikuti dan kami mencoba membagi kepada pembaca apa yang didapat dari forum-forum tersebut.

Regional Conference On Economic, Social, and Ecological Implications of Industrial Relocations

Jakarta, 19 – 20 Juli 1995

Penyelenggara : **CIDES, CIDA, KONPHALINDO dan UNDP**

Konfrensi ini membahas proses dan dampakn relokasi industry dikawasan Asia. Pengalaman dari berbagai Negara seperti Korea Selatan, Hongkong, Singapura, Malaysia, Philipina dan Indonesia dibahas bersama-sama, untuk memperoleh gambaran tentang situasi yang pernah, sedang dan akan terjadi. Hampir semua pengalaman menunjukkan bahwa relokasi industri itu sesuatu gejala yang lumrah terjadi, dan malah dibutuhkan. Seperti diketahui proses relokasi industri selain menimbulkan dampak positif seperti menunjang pertumbuhan ekonomi, dan perluasan kesempatan kerja, juga menimbulkan dampak negatif, seperti tensi sosial dan degradasi kualitas lingkungan hidup. Masalahnya sekarang bagaimana supaya proses itu bisa berlangsung tanpa menimbulkan dampak negatif.

Berbagai upaya harus dilakukan supaya prose situ berjalan optimal; seperti penguatan posisi buruh, penyeleksian jenis teknologi yang adaptif dengan prinsip pembangunan berwawasan lingkungan, pengetatan aplikasi dan sanksi hukum lingkungan.

▲ **DEDI HARYADI**

Refleksi Gerakan Perempuan Indonesia

Jakarta, 25 Juli 1995

Penyelenggara : OXFAM

Diskusi ini untuk merefleksikan tentang eksistensi gerakan perempuan di Indonesia dewasa ini. Acara berlangsung menarik karena menjadi ajang untuk berkaca diri mengenai perilaku aktivis perempuan dalam mewujudkan perjuangan mengangkat persoalan perempuan. Hadir dalam acara ini tokoh-tokoh perempuan dan pemerhati persoalan dan pemerhati persoalan perempuan dari kalangan LSM terutama di Jakarta, Yogyakarta, dan lain-lain. Diskusi lanjutan direncanakan diselenggarakan di Bandung bulan Oktober 1995.

▲ **INDRASARI TJANDRANINGSIH**

Seminar Nasional Aktualisasi Pengalaman Pancasila dan UUD'45 dalam Era Globalisasi

Jakarta, 27 -28 Juli 1995

Penyelenggara : Universitas Mercu Buana dan LEMHANAS

Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Universitas Mercu Buana dan Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANAS). Pada kesempatan ini hadir ratusan peserta dari berbagai kalangan. Sejumlah pakar dibidang ekonomi, politik, sosial-budaya, dan hukum hadir dan menyajikan makalahnya yang berisikan analisis terhadap kebijakan dan situasi yang ada dan upaya perumusan strategi dalam rangka pemurnian nilai dasar Pancasila dan UUD 1945 dalam menghadapi era keterbukaan. Selain Rektor Univ. Mercu Buana Prof. Harun Zain, SE., Gubernur Lemhanas Letjen TNI Moetojib dan H. Probosutedjo selaku ketua Yayasan Menara Bhakti, hadir pula Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Ir Azwar Anas. Situasi diskusi cukup terbuka dan kritis walaupun tidak bisa tuntas mengingat banyaknya topic yang dibahas dalam waktu yang relative singkat.

▲ **HETIFAH SJAIFUDIAN**

Seminar dan Workshop : The Role of Cooperation in supporting Rural Industrialization in Indonesia

Jakarta, 4-5 Agustus 1996

Penyelenggara : FE UKI dan Erasmus University Rotterdam (EUR)

Kegiatan ini dibuka oleh Menteri Koperasi dan PKK Subiyakto Tjakrawerdya ini. Tujuannya untuk berbagi pengalaman dan diskusi mengenai peran koperasi dalam pembangunan ekonomi dan mencari format dukungan pemerintah yang tepat bagi koperasi untuk berperan dalam industrialisasi pedesaan. Diskusi berkisar pada persoalan mengkaji akar persoalan; mengapa sampai saat ini koperasi sebagai instrument ekonomi masih belum mampu mendongkrak perekonomian desa. Masih terjadi debat yang cukup hangat ketika dicoba mencari pendekatan yang paling cepat untuk mem'fungsi'kan koperasi. Banyak peserta masih melihat bahwa pendekatan ekonomi perse, tidak cukup untuk memperbaiki kinerja koperasi. Karena itu dibutuhkan pendekatan lain misalnya secara politis. Namun saying isu ini hanya menyentuh permukaannya saja tidak sempat dielaborasi lebih dalam lagi, terutama karena waktunya terbatas.

Kegiatan hari pertama berupa seminar, dalam bahasa Inggris. Sedangkan hari kedua berupa workshop, dalam bahasa Indonesia. Pembicara dalam seminar adalah Prof.Dr.Baburrao Baviskar (ahli koperasi dari India), Prof.Dr.SMP Tjondronegoro (IPB), Prof. Wagiono Ismangil (FE UI), Prof. Mubyarto (UGM – diwakili asistennya), Dr. Piet Terhal (EUR) dan Dr. Tulus Tambunan (FE UKI). Sedangkan workshop diselenggarakan melalui mekanisme diskusi kelompok dan terakhir ada pada rapat pleno.

▲ **FRIDA RUSTIANI**

Dialog tentang Perkosaan

Jakarta, 22 Agustus 1995

Penyelenggara : Yayasan Kalyanamitra

Kegiatan yang bertujuan menyebarkan kesadaran tentang perkosaan dan tindak kekerasan dan menggalang kebersamaan masyarakat dalam menghadapi dan mengatasi masalah perkosaan, ini digelar dengan dipandu oleh Sita Aripurnama. Kegiatan ini, yang sifatnya dialog, lebih banyak menggali dan memperluas debat public seputar fenomena tindak

kekerasan perkosaan. Dalam dialog ini keenpat pembicara lebih banyak berperan sebagai pelemat isu-isu pokok dengan harapan mendapat respon dari peserta dialog. Dalam perjalanannya debat public lebih banyak terjadiseputar posisi subordinat perempuan dalam masyarakat Indonesia, yang diyakini sebagai akar permasalahan dari tindak kekerasan perkosaan.

Berbicara pada kesempatan ini adalah Sartono Mukadis (konsultan psikologi), Nursyahbani Katjasungkana (pakar hukum), Kintan Umari (peragawati) dan dr. Mun'im Idries (dokter forensik).

▲ **FRIDA RUSTIANI**

**Seminar 20 Tahun TRI:
Refleksi Kritis Tebu Rakyat Intensifikasi
dan Kesejahteraan Petani Tebu**

Yogyakarta, 23-24 Agustus 1995,

**Penyelenggara : Forum LSM/LPSM DIY dan Kelompok Diskusi Cangkem, FISIPOL
Universitas Atmajaya**

Seminar ini bertujuan untuk mengangkat kembali isu program TRI yang telah memasuki usia ke duapuluh tahun pelaksanaan. Seminar pada intinya mempertanyakan soal masih dipertahankannya program TRI oleh pemerintah, karena dalam banyak kasus program ini malah menyengsarakan rakyat (petani kecil). Kenyataan lain juga terungkap bahwa selama dua puluh tahun program berjalan, produktivitas gula nasional tidak terjadi karena adanya peningkatan produktivitas lahan tebu setiap hektarnya, tetapi lebih disebabkan karena penambahan luas lahan dari tahun ke tahun. Bahkan produktivitas lahan tebu per hektarnya cenderung mengalami penurunan. Seminar juga mengungkapkan bahwa program TRI ternyata tidak berhasil menghilangkan mekanisme sewa menyewa lahan dan meningkatkan pendapatan petani pesertanya, dua hal yang justru menjadi tujuan ideal dicanangkannya program ini.

Seminar juga mengangkat persoalan monopoli tataniaga gula oleh BULOG yang turut menyumbang pada rendahnya pendapatan petani dan tidak bergairahnya pabrik gula untuk meningkatkan kualitas hasil tebu olehannya (gula). Dalam seminar ini berbicara lima orang narasumber, yaitu: Prof. Dr. Loekman Soetrisno (Kepala TRI dari Kab. Bantul), Ir. Hatta Sunanto,MS (Dosen Univ. Eangsa Manggala, Yogyakarta), dan Abdurrahman Wahud (Ketua PB NU).

▲ **DIANTO BACHRIADI**

Seminar Buruh Perempuan ILO

Jakarta, 24 Agustus 1995
Penyelenggara : ILO Jakarta

Pada intinya merupakan parade kondisi buruh perempuan yang masih memperhatikan. Tidak ada hal baru mengenai isu buruh perempuan dan belum terumuskan langkah, solusi konkrit terhadap persoalan yang dihadapi buruh perempuan.

▲ **INDRASARI TJANDRANINGSIH**

Konferensi NGO Dunia Keempat Tentang Perempuan

Beijing, 31 Agustus – 9 September 1995

Penyelenggara : PBB

Konferensi ini merupakan konferensi rutin yang diselenggarakan oleh PBB untuk menyuarakan dan memperjuangkan hak-hak perempuan di seluruh dunia. Tidak ada konferensi dunia PBB lainnya selama Dasawarsa PBB untuk Perempuan diselenggarakan tahun 1975 (Mexico), tahun 1980 (Kopenhagen) dan tahun 1985 (Nairobi). Rangkaian konferensi tersebut biasanya paralel dengan diselenggarakannya NGO Forum, termasuk konferensi tahun ini. Rangkaian konferensi dunia ini mempunyai tujuan umum yaitu membangun dan menegaskan pola hubungan yang setara, adil, demokratis, bebas dari kekerasan, dan bermartabat bagi perempuan di seluruh dunia. Pada konferensi ini diselenggarakan rangkaian workshop dengan 11 tema besar yaitu: Economy, Governance & Politics, Human/legal Rights, Peace & Human Security, Education, Health, environment, Spiritual & Religion, science & Technology, Media, Arts & Culture, Race & Ethnicity and Youth.

Pada intinya workshop-workshop tersebut menampilkan berbagai kasus di berbagai Negara mengenai ketimpangan dan diskriminasi yang dialami perempuan. Khusus untuk bidang ekonomi, tampilan kasus dari berbagai Negara lebih memfokuskan pada tidak atau belum diakuinya hak ekonomi perempuan di sebagian besar Negara dunia ketiga. Faktor penyebabnya diantaranya adanya system nilai, budaya dan sosial perempuan. Tema-tema lain yang cukup menarik banyak peserta adalah *reproductive rights* dan *reproductive health*. Dan ini merupakan isu yang peka sekaligus memiliki bobot politis yang tinggi berkaitan dengan program-program keluarga berencana yang dicanangkan pemerintah Cina untuk warganya.

▲ **ERNA ERNAWATI CHOTIM**

Workshop INFID on Information Management

Jakarta – Puncak, 3-5 September 1995

Penyelenggara : **INFID**

Workshop ini bertujuan mengevaluasi perkembangan sistem manajemen dan dokumentasi INFID selama ini, khususnya mengenai E-mail. Juga bagaimana pemanfaatannya oleh masing-masing partisipan, khususnya dalam advokasi NGO. Dibahas juga bagaimana langkah selanjutnya pemanfaatan dan pengembangan jaringan Nusa.Net untuk berbagi informasi antar pengguna.

Hasil diskusi memberikan beberapa rekomendasi penting, yaitu antara lain membangun E-mail conference untuk kepentingan advokasi dan membangun sebuah database informasi yang dimiliki oleh NGO-NGO pengguna Nusa.Net agar tercipta sharing informasi yang baik.

Peserta yang hadir yaitu dari Jepang (JANNI), Belanda (INFID The Hague), Australia (IAPC), dan dari Manila. Yang lainnya dari Bandung (AKATIGA), Jakarta (ELSAM), Kalyanamitra, YLBHI, Medan (KSPPM), Salatiga (GENI), Jayapura (Fokker), Yogyakarta (Forum LSM Yogya).

▲ **MARLIZA**

Workdop Metode Pendampingan Pekerja Anak

Jakarta, 12-14 September 1995

Penyelenggara: **Yayasan Gugus Analisis, Jakarta**

Workshop ini bertujuan merumuskan kegiatan konkrit yang dapat dilakukan LSM secara bersama atau saling mendukung untuk mengangkat persoalan yang dihadapi oleh pekerja anak, khususnya buruh anak di berbagai sector dan anak jalanan atau anak marginal di perkotaan.

Acara yang dihadiri kurang lebih 15 LSM pendamping pekerja anak diawali dengan saling tukar pengalaman mengenai kegiatan metode dan kelompok dampingan dengan didasari oleh kertas kerja yang telah disiapkan sebelumnya. Tujuan lain dari pertemuan ini adalah juga menerbitkan buku tentang metode pendampingan pekerja anak. Hadir dalam workshop: ISI, YNDN, YPRK, AKATIGA, Rumah Singgah YKAI, LWRA, SPSI, KOMPAK, YPSM, Muhammadiyah Bandung, YBP, Mitra Masyarakat Kota, LKRAPIN.

▲ **INDRASARI TJANDRANINGSIH**



AKATIGA pusat analisis sosial adalah lembaga penelitian nirlaba yang melakukan berbagai kegiatan penelitian, pelatihan, penerbitan, pengembangan jaringan kerjasama yang saling menguntungkan, dan advokasi kebijakan pembangunan.

Dalam menjalankan aktivitasnya, AKATIGA mengembangkan prinsip independen, multidisiplin, partisipatif, dan berorientasi pada upaya penguatan posisi masyarakat sipil, khususnya mereka yang lemah dan tertinggal dalam proses pembangunan. Upaya penguatan tersebut dilakukan melalui kajian kritis terhadap proses dan kebijakan pembangunan yang berdampak pada rakyat kecil. AKATIGA mengembangkan kegiatan-kegiatan pengembangan informasi, publikasi, dokumentasi, serta pelatihan. Hasil-hasil penelitian tersebut diolah menjadi informasi dan analisis yang ditujukan untuk perkembangan wacana maupun untuk menunjang kerja-kerja pemberdayaan dan advokasi yang dilakukan oleh organisasi non pemerintah dan masyarakat akar rumput.

AKATIGA melakukan advokasi melalui kerjasama dengan jaringan-jaringan yang relevan, strategis dan mampu menjangkau komunitas/kelompok di lapisan bawah yang tersisihkan. AKATIGA juga mengembangkan jasa pelayanan dalam bentuk pelatihan metodologi penelitian yang terutama ditujukan kepada omop. Tujuan yang ingin dicapai melalui kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas analisis omop dalam rangka menyusun strategi yang lebih tepat sasaran dan advokasi yang lebih kontekstual.

Seluruh kegiatan AKATIGA ditujukan untuk mendorong terbukanya peluang bagi perbaikan kehidupan kelompok miskin dan untuk membangkitkan kemandiriannya agar tidak terus tersisih dalam proses pembangunan.



AKATIGA

pusat analisis sosial

Jl. Tubagus Ismail II No. 2 Bandung 40134 - Indonesia

Telp: 022-2502302 - Fax: 022-2535824

Email: akatiga@indo.net.id

www.akatiga.org